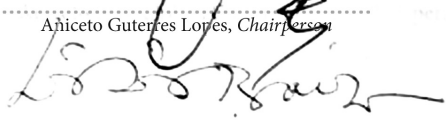


Surat penyerahan Laporan dari Komisaris Nasional CAVR

O Relatório da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste (CAVR) foi apresentada ao S.E. Presidente da República, Kay Rala Xanana Gusmão, no dia 31 de Outubro de 2005.*



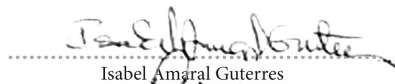
.....
Aniceto Guterres Lopes, Chairperson



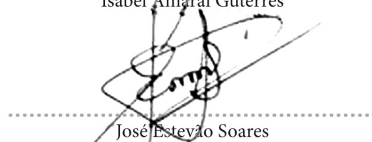
.....
Fr. Jovito do Rêgo de Jesus Araújo, Vice-Chairperson



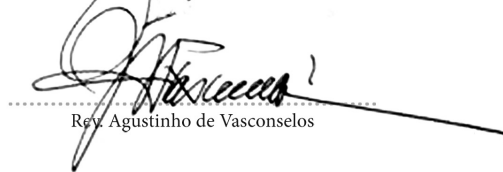
.....
Maria Olandina Isabel Caeiro Alves



.....
Isabel Amaral Guterres



.....
José Estevão Soares



.....
Rev. Agostinho de Vasconcelos



.....
Jacinto das Neves, Domingos Alves

* Terjemahan: Laporan CAVR diserahkan kepada Presiden Republik Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, 31 Oktober 2005.

SIMU MALU, LIA LOS NO REKONSILIASAUN
TIMOR LORO SAE
SIMU POSSE BA KOMISARIS NASIONAL
21 JANEIRO 2002



Foto dari arsip CAVR

Chega!

Bagian

1.

Pendahuluan

Bagian 1. Pendahuluan

7 | Latar belakang Komisi

- 9 | Dari kolonialisme ke pendudukan militer
- 13 | Pertemuan kembali: rekonsiliasi
- 15 | Asas penyusunan Laporan
- 15 | Kebenaran

17 | Asal-mula Komisi

- 17 | Lokakarya dan Kongres CNRT
- 18 | Hasil konsultasi publik Komite Pengarah
 - 18 | Pencarian Kebenaran dan Keadilan
 - 19 | Rekonsiliasi
 - 20 | Mendukung para korban
- 20 | Memilih nama Komisi
- 21 | Regulasi Nomor 10/2001, Pembentukan Komisi
- 22 | Kantor Interim
- 22 | Dewan Penasihat CAVR

23 | Pembentukan Komisi

- 23 | Komisaris Nasional
- 24 | **Boks: Profil Komisaris Nasional**
- 27 | Prinsip-prinsip dan misi Komisi
- 28 | Komisaris Regional

29 | Hal-hal dan tantangan operasional

- 29 | Tantangan praktis bagi kerja Komisi
- 30 | Tantangan bahasa
- 31 | Pendekatan terpadu berbasis komunitas
- 32 | **Boks: Proyek percontohan mengenai pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, dan dukungan korban**
- 35 | Rencana strategis

37 | Program-program inti

- 37 | Pencarian kebenaran
 - 37 | Pengambilan pernyataan dan pengolahan data
 - 39 | Penelitian
 - 40 | Audiensi publik
 - 40 | **Audiensi korban**
 - 41 | **Audiensi publik nasional**

- 42 | Penelitian angka kematian
- 43 | Submisi
- 44 | Sumber-sumber informasi
- 46 | Rekonsiliasi Komunitas
- 48 | Penerimaan dan dukungan korban
- 49 | Laporan akhir
- 51 | Arsip
- 52 | Kewajiban Komisi terhadap para peserta dalam program-program intinya
 - 52 | Kerahasiaan
 - 52 | Hak-hak para deponen dalam PRK
- 53 | **Perlindungan saksi**

53 | Kantor Nasional dan Regional serta masalah kepegawaian

- 53 | Kantor Nasional
- 53 | **Boks:** Dari penjara menjadi pusat memorial untuk korban, Hak Asasi Manusia, dan Rekonsiliasi
- 56 | CAVR sebagai institusi pembelajaran
- 56 | Pengembangan institusi dan pembangunan kapasitas
- 57 | Gender dan kepegawaian
- 58 | Kantor Regional dan Tim Distrik
- 59 | Gender dalam kerja distrik
- 60 | Peran staf internasional dalam Komisi

61 | Manajemen dan administrasi

- 61 | Struktur manajemen
- 61 | Administrasi
- 62 | Keuangan
- 62 | Pengurangan staf dan restrukturisasi

63 | Membangun hubungan untuk masa depan

- 63 | Hubungan langsung
- 65 | **Boks:** Nota Kesepahaman dengan Kantor Kejaksaan Agung
- 65 | Kampanye media dan informasi
- 66 | Komunitas internasional
- 67 | Penjangkauan komunitas dan informasi publik

Daftar tabel:

- 68 | Tonggak-tonggak sejarah Komisi

Pendahuluan

1.

Latar belakang Komisi

1. Perjuangan panjang rakyat Timor-Leste untuk merebut kebebasan dan masa depannya sebagai bangsa mencapai titik yang menentukan pada 1999. Setelah ratusan tahun kolonialisme Portugis dan 24 tahun pendudukan asing, kita akhirnya bisa mengungkapkan keinginan kita untuk hidup sebagai bangsa yang bebas dan merdeka di negara yang bebas dan merdeka, ketika masyarakat internasional pada akhirnya mendukung hak dasar kita atas penentuan nasib sendiri. Penindasan dalam masa kolonialisme yang panjang dan kekerasan menggemparkan sepanjang masa pendudukan militer asing berpuncak pada suatu aksi kekerasan penghabisan terhadap rakyat Timor-Leste pada September dan Oktober 1999, yang meninggalkan negeri kita dalam keadaan porak-poranda setelah kepergian militer itu.
2. Tanda-tanda kehancuran tampak jelas bagi semua pihak. Kota-kota dan desa-desa yang hangus terbakar, gedung-gedung dengan bercak-bercak darah yang menjadi tempat pembantaian, seluruh wilayah hampir kosong dari penduduknya yang melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka. Ketika rakyat perlahan-lahan kembali ke rumah untuk mencari yang hidup dan berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan, serta ketika masyarakat internasional datang dengan bantuan darurat, perlahan-lahan luka lama dari konflik-konflik politik yang berlangsung lama menjadi semakin tampak nyata.
3. Bagi orang kebanyakan, warisan dari konflik selama 24 tahun itu sangat besar dan memiliki banyak segi. Di tengah puing-puing kehancuran dari masa akhir 1999, sangat jelas bahwa perlu diambil langkah untuk menangani banyak unsur dari warisan ini, untuk membantu rakyat membangun kembali kehidupan mereka, dan menjadikan hak asasi manusia dan penegakan hukum sebagai asas-asas yang mengatur perikehidupan negara baru ini.
4. Pada 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan misi UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor, Pemerintahan Transisi PBB di Timor-Leste), dengan mandat untuk menjadi pemerintah peralihan di wilayah ini dan mempersiapkannya untuk kemerdekaan. Ketika

kebutuhan-kebutuhan awal krisis kemanusiaan berkurang, perhatian dialihkan pada pembentukan lembaga-lembaga yang sangat mendasar. Ini meliputi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan keadilan, termasuk untuk pelanggaran-pelanggaran di masa lalu.

5. Keprihatinan pertama dari banyak aktivis hak asasi manusia Timor-Leste adalah bagaimana membantu mengatasi keadaan darurat kemanusiaan yang ditimbulkan oleh kekerasan September - Oktober. Ketika program-program bantuan kemanusiaan telah dijalankan, pada tahun 2000 para aktivis beralih ke masalah kejahatan masa lalu dan warisan konflik yang berlangsung lama. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan berkobarnya kembali kekerasan, khususnya dalam konteks impunitas nyaris penuh yang dinikmati oleh para pelaku kejahatan; dan mengenai masalah yang berjangka lebih panjang tentang bagaimana mengembangkan budaya penghormatan hak asasi manusia dan penegakan hukum dalam masyarakat yang telah lama mendambakannya.

6. Pada akhir 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan Komisi Penyelidikan untuk menyelidiki kejadian-kejadian yang belum lama berlangsung dan untuk memberikan rekomendasi mengenai bagaimana pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenainya dimintai pertanggungjawaban. Komisi ini merekomendasikan pembentukan Mahkamah Pengadilan Internasional untuk mengadili kasus-kasus kejahatan 1999. Tapi, PBB malah menyelenggarakan proses Peradilan Kejahatan Berat di Timor-Leste dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperlihatkan kesungguhannya pada penegakan hukum dengan menggunakan sistem peradilan sendiri untuk mengadili orang-orang yang berada di Indonesia. Aktivis-aktivis hak asasi manusia Timor-Leste, yang menyadari bahwa dampak dari konflik pada masyarakat Timor-Leste tidak terbatas pada kejadian-kejadian tahun 1999, mengupayakan langkah-langkah lain untuk melengkapi proses ini.

7. Pada 7 Maret 2000 konferensi Comissão Política Nacional (Komisi Politik Nasional, CPN) CNRT memutuskan agar CNRT (Conselho Nacional de Resistência Timorese, Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor) membentuk komisi rekonsiliasi. Pada Juni 2000 dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Rekonsiliasi CNRT, dengan dukungan dari Universitas Uppsala dan Unit Hak Asasi Manusia UNTAET, dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi politik, hak asasi manusia, dan Gereja Katolik, gagasan mengenai komisi kebenaran dan rekonsiliasi dibahas lebih lanjut. Kelompok ini selanjutnya mengajukan gagasan ini kepada Kongres Nasional CNRT pada Agustus 2000, suatu pertemuan bersejarah untuk merumuskan visi bagi Timor-Leste yang baru merdeka. Kongres ini mengesahkan gagasan mengenai komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta menetapkan panitia pengarah dengan tugas menyelenggarakan konsultasi untuk menentukan apakah gagasan ini diterima oleh masyarakat Timor-Leste yang lebih luas. Inilah awal dari CAVR.

Dari kolonialisme ke pendudukan militer

8. Terletak sekitar 500 kilometer di utara Australia, Timor-Leste menyambungkan Asia dan Pasifik, dan hal ini bisa dilihat pada keanekaragaman budaya dan bahasa negeri ini. Timor dulu dijajah oleh bangsa Portugis, yang kekuasaannya di kawasan ini merosot menghadapi pertumbuhan kekuatan Belanda dan Inggris. Selama beberapa abad selanjutnya Timor Portugis menjadi semakin terisolasi, satu-satunya tempat berpijak Portugal di tepian Asia Tenggara.

9. Pijakan Portugis di Timor sangat lemah sampai abad ke-19, karena sedikit yang dilakukannya untuk menegakkan kekuasaannya atas mayoritas orang Timor-Leste yang tinggal di pedalaman yang bergunung-gunung. Pada pertengahan abad ke-19, Portugal memulai penanaman kopi secara paksa sebagai tanaman penghasil uang, yang bersama dengan pemberlakuan berbagai jenis pajak membuat kekuasaan mereka meningkat atas kehidupan sehari-hari rakyat Timor. Pemberontakan-pemberontakan meledak sampai memasuki awal abad ke-20, ketika orang-orang Portugis memadamkan dengan keras pemberontakan yang dipimpin oleh Dom Boaventura dari Manufahi, yang mendapatkan dukungan luas dari seluruh wilayah. Portugal berusaha mempertahankan kekuasaannya melalui sistem pemerintahan yang menguntungkan pemimpin-pemimpin setempat tertentu dengan merugikan yang lain. Hasilnya adalah suatu masyarakat yang kurang memiliki jalinan erat yang merupakan syarat bagi perkembangan perasaan kebangsaan.

10. Warisan kolonial ini diperparah oleh kenyataan bahwa untuk hampir seluruh masa abad ke-20 Portugal sendiri berada di bawah kekuasaan rezim otoriter Salazar dan penggantinya Marcello Caetano. Sejak akhir dasawarsa 1920-an sampai Revolusi Anyelir April 1974, kebebasan politik di Portugal sangat dibatasi. Portugal menindas semua keinginan untuk merdeka di tanah-tanah jajahannya, menyebut semuanya sebagai bagian tak terpisahkan dari Portugal bahkan setelah PBB pada 1960 menyatakan wilayah-wilayah ini sebagai wilayah tanpa pemerintahan sendiri. Portugal adalah negara Eropa-penjajah terakhir yang melakukan dekolonisasi, mengabaikan gelombang dekolonisasi yang dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Baru setelah perang-perang pembebasan yang berkobar di koloni-koloni Portugal di Afrika meyakinkan banyak orang Portugis bahwa imperium itu tidak bisa dipertahankan, perubahan datang dengan pecahnya Revolusi Anyelir pada 15 April 1974.

11. Janji dekolonisasi adalah salah satu pelek perjuangan revolusi ini di Lisabon. Tapi, bagi Portugal, dekolonisasi terutama berarti segera keluar dari perang melawan gerakan pembebasan di koloni-koloni Afrika mereka. Koloni mereka di Asia, Timor, adalah kasus khusus yang dengan mudah terabaikan. Selama bulan-bulan selanjutnya, politik Portugis terhadap Timor mengidap kekurangan perhatian dan perencanaan, diperparah oleh pergantian pemerintah yang terus-menerus di Lisabon. Di Timor, Revolusi Anyelir membuka jalan bagi cita-cita kebebasan di kalangan penduduk yang aktif berpolitik, yang sebagian besar adalah orang muda dan tidak berpengalaman. Perkumpulan-perkumpulan politik segera dibentuk, dengan dua yang utama, Associação Social Democrata Timorensis (Perkumpulan Sosial Demokrat Timor, ASDT), yang kemudian diubah namanya menjadi Frente

Revolucionária de Timor-Leste Independente (Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Leste, Fretilin), dan União Democrática Timorense (Persatuan Demokratik Timor, UDT), menginginkan kemerdekaan wilayah ini.

12. Masa itu adalah titik tertinggi Perang Dingin. Pada 1975 setelah Revolusi Anelir, perang di Vietnam mencapai titik akhirnya dengan kemenangan Vietnam Utara yang komunis atas Vietnam Selatan dan Amerika Serikat pelindungnya. Di tengah-tengah ketakutan Amerika Serikat dan Barat umumnya akan “dampak domino” yang bisa mengubah lebih banyak lagi negara Asia Tenggara menjadi komunis, rezim militer Presiden Soeharto yang sangat anti-komunis dipandang sebagai satu benteng stabilitas bagi kawasan ini.

13. Harapan bahwa dekolonisasi di Timor akan berlangsung lancar dihambat oleh pengabaian Portugis, campur tangan Indonesia yang didukung oleh sekutu-sekutu penting Baratnya, Amerika Serikat dan Australia, dan rendahnya pengalaman politik para pemimpin partai-partai yang baru dibentuk, yang kebanyakan adalah orang muda dan dengan wacana politik yang sangat diwarnai retorika mengenai kekerasan dan serangan pribadi, bukannya pertukaran gagasan.

14. Pada 11 Agustus 1975, partai kanan-tengah UDT melancarkan gerakan bersenjata di Dili. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kontrol atas wilayah ini, menuntut pengusiran orang-orang Portugis dan Timor-Leste yang radikal, dan dengan demikian menunjukkan kepada Indonesia bahwa Timor tidak sedang menjadi ladang pembibitan komunisme. Suasana yang telah rentan ini meledak menjadi kekerasan yang melanda seluruh distrik Timor. Dalam waktu sepuluh hari, partai sayap kiri Fretilin menanggapi dengan kebangkitan bersenjata umum.

15. Perang saudara yang singkat ini selesai pada awal September, tetapi telah mengubah keadaan tanpa bisa dikembalikan lagi. Pertempuran yang terjadi memangsa nyawa 3.000 orang dan meninggalkan luka yang dalam dan lama. Pada akhir Agustus, pemerintah kolonial Portugis meninggalkan wilayah utama menuju Pulau Ataúro, tanpa pernah kembali. Para pemimpin dan anggota UDT, dan tiga partai kecil yang lain, Associação Popular Democrática Timorense (Perkumpulan Kerakyatan Demokratik Timor, Apodeti), Klibur Oan Timor Aswain (Perkumpulan Kesatria Putra Timor, KOTA), dan Trabalhista (Buruh), lari melintasi perbatasan memasuki Timor Barat Indonesia, dan bersekutu dengan tujuan Indonesia.

16. Angkatan bersenjata Indonesia telah melancarkan operasi tertutup di Timor Portugis sejak pertengahan 1974, dan memberi anggota-anggota Apodeti latihan militer di Timor Barat sejak Desember 1974. Mulai September 1975, tentara Indonesia mengadakan operasi lintas-batas memasuki Timor Portugis dengan tujuan menghancurkan posisi pemerintah *de facto* Fretilin yang sedang menghadapi kesulitan. Pada Oktober 1975, mereka meningkatkan operasi-operasi ini dengan melancarkan serangan gabungan besar-besaran dari udara, laut, dan darat yang menghasilkan pendudukan kota-kota kunci di Distrik Bobonaro yang terletak di bagian barat negeri.

17. Fretilin, yang ingin mengembalikan proses dekolonisasi pada jalurnya, mengusahakan kembalinya pemerintah Portugis. Gubernur Mário Lemos Pires, yang tidak mendapatkan dukungan atau pengarahan dari Lisabon, menolak kembali atau berunding dengan Fretilin karena pengakuan Fretilin sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Timor-Leste. Untuk mencegah agresi militer dari Indonesia serta mendapatkan pengakuan dan bantuan internasional, Fretilin mengumumkan kemerdekaan pada 28 November 1975.

18. Empat partai politik lain Timor-Leste, di bawah tekanan dari tentara Indonesia, menandatangani satu deklarasi, Deklarasi Balibó, di Bali pada hari berikutnya, yang mendeklarasikan integrasi Timor Portugis ke dalam negara Indonesia. Indonesia melancarkan invasi skala penuh terhadap Timor-Leste pada 7 Desember 1975. Fretilin dan sayap bersenjataanya, Falintil (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste), mundur ke pedalaman bersama puluhan ribu penduduk sipil. Maka dimulailah perang yang berlangsung selama 24 tahun, yang melalui berbagai tahap militer dan politik.

19. Indonesia berusaha mengesahkan pencaplokannya atas Timor-Leste. Majelis Rakyat Timor Timur, yang terdiri atas orang-orang Timor-Leste yang diseleksi dengan seksama, mengadakan rapat di Dili pada Mei 1976 dan, dengan mengutip Deklarasi Balibó, secara aklamasi mengesahkan petisi meminta integrasi. Atas dasar tindakan yang dilakukan sebagai penentuan nasib sendiri ini, pada Juli 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan undang-undang yang menyatakan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah mengakui proses ini sebagai tindakan penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste yang diakui internasional. Dewan Keamanan PBB pada Desember 1975 dan April 1976 mengutuk invasi dan menyerukan penarikan pasukan tentara Indonesia. Majelis Umum PBB mengeluarkan mosi mendukung penentuan nasib sendiri untuk Timor-Leste setiap tahun sampai 1982, ketika masalah ini dirujuk kepada jasa baik Sekretaris Jenderal. Timor-Leste tetap berada dalam agenda PBB sepanjang masa pendudukan, terdaftar sebagai satu wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri di bawah administrasi Portugal.

20. Dalam kenyataan, anggota-anggota penting PBB tidak banyak berbuat untuk menentang pencaplokan Indonesia ataupun cara-cara kekerasan yang dilakukan untuk memperkuat pencaplokan itu. Kebanyakan negara siap bertoleransi terhadap Indonesia sebagai satu negara besar di kawasan Asia Tenggara. Keadaan di Timor-Leste sangat tidak dimengerti. Pemerintah negara-negara yang bersahabat dengan Indonesia mendukung versi Indonesia mengenai apa yang terjadi di sana. Terkucil di kawasannya sendiri di masa kolonialisme Portugis, Timor-Leste menjadi wilayah tertutup dalam 13 tahun pertama pendudukan ketika tentara Indonesia menggunakan setiap cara yang bisa dilakukannya untuk menundukkan rakyat Timor-Leste. PBB terhalangi upayanya untuk memasuki Timor-Leste untuk menilai keadaan, bantuan asing diblokade, dan diplomat serta media asing hanya diberi izin untuk melakukan kunjungan dalam jumlah terbatas dan dikontrol ketat. Orang Timor-Leste di pengasingan bekerja keras bersama masyarakat sipil internasional untuk menarik

perhatian kepada penderitaan rakyat Timor-Leste, tetapi dengan sarana yang terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara yang mendukung Indonesia.

21. Perang mencapai setiap desa di Timor-Leste dan berpengaruh mendalam pada kehidupan seluruh rakyat Timor-Leste. Terputus dari dunia luar dan tanpa perlindungan kelembagaan apapun, penduduk sipil biasa secara besar-besaran menderita karena berbagai serangan tanpa ampun dan kekejaman militer Indonesia yang tanpa pandang bulu, khususnya pada tahun-tahun awal pendudukan. Orang yang dipandang sebagai lawan politik pendudukan diperlakukan dengan sangat kejam. Khususnya pada tahun-tahun awal pendudukan, penduduk sipil biasa juga bisa mengalami perlakuan yang kejam kalau mereka bertentangan dengan gagasan luas Resistansi mengenai penyimpangan ideologis.

22. Dalam seluruh masa itu pemimpin militer dan politik Indonesia mengklaim bahwa kegiatan sejumlah kecil “pengacau keamanan” telah tamat, perang telah selesai, dan bahwa laporan-laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia itu palsu. Sekutu-sekutu asing Indonesia terlibat mendukung kebohongan-kebohongan ini, yang dengan demikian berarti memperkuat impunitas yang diperoleh militer Indonesia di dalam negeri dan memungkinkannya melanjutkan operasi-operasi biadabnya menundukkan rakyat Timor-Leste tanpa hambatan.

23. Sepanjang masa pendudukan, sifat konflik beberapa kali berubah. Dasawarsa 1970-an adalah masa operasi-operasi militer besar yang bertujuan menghancurkan Resistansi bersenjata yang dipimpin Fretilin. Penduduk sipil dalam jumlah sangat besar tinggal di pedalaman bersama Resistansi, dan secara langsung menderita karena operasi-operasi militer tersebut. Pada akhir dasawarsa 1970-an, Resistansi bersenjata hancur, dan strateginya mengenai basis tetap, di mana penduduk sipil berperan penting, berakhir. Ketika penduduk sipil terpaksa keluar dari pedalaman, militer Indonesia meluncurkan strategi memisahkan penduduk sipil dari Resistansi bersenjata dengan menempatkan puluhan ribu penduduk sipil yang menyerah di kamp-kamp tahanan dan desa-desa pemukiman dengan akibat malapetaka bagi rakyat Timor-Leste, yang menderita kelaparan luar biasa pada akhir dasawarsa 1970-an dan awal dasawarsa 1980-an.

24. Resistansi disusun kembali pada dasawarsa 1980-an menjadi kekuatan gerilya, yang didukung oleh gerakan bawahan yang sedang tumbuh di kota-kota dan desa-desa. Tentara Indonesia memperluas jangkauan teritorialnya ke semua desa di Timor-Leste, yang mencakup kehadiran intelijen dan kesatuan-kesatuan paramiliter yang mencengkeram yang kebanyakan diawaki oleh orang Timor-Leste. Militerisasi masyarakat Timor-Leste ini sangat meluas dan berdampak sangat menghalangi seluruh jenis hak rakyat Timor-Leste yang diakui secara internasional, mulai dari hak politik dan sipil sampai hak ekonomi, sosial, dan budaya.

25. Pada akhir dasawarsa 1980-an, Indonesia mengklaim telah “menormalkan” Provinsi Timor Timur, dan mencabut sebagian larangan memasuki wilayah ini. Sebelumnya, pada awal 1980-an orang-orang muda mulai memasuki pendidikan universitas di Indonesia, dan gerakan bawahan semakin dijalankan oleh

generasi baru ini. Ketika Perang Dingin berakhir pada 1989, dan ketika orang asing sedikit-sedikit memasuki Provinsi Timor Timur yang baru dibuka, generasi muda ini berada di garis depan strategi baru Resistansi, di mana demonstrasi melawan pendudukan menjadi salah satu unsur intinya. Tanggapan Indonesia keras dan tak kenal kasihan, dan pada 1991 peristiwa terkenal Pembantaian Santa Cruz terhadap orang-orang muda oleh pasukan keamanan Indonesia terjadi di Dili. Berbeda dengan pembantaian-pembantaian sebelumnya, pembantaian ini difilmkan oleh seorang pembuat film asing dan gambar-gambar tentang kekejaman itu mencapai dunia luar. Ini berdampak besar pada pemahaman seluruh dunia mengenai keadaan di Timor-Leste, dan mendorong bangkitnya kembali upaya internasional untuk mencari satu penyelesaian bagi “persoalan Timor-Leste.”

26. Dengan bangkitnya kembali perhatian pada Timor-Leste, dan perubahan wawasan dalam pandangan politik global akibat berakhirnya Perang Dingin, Indonesia menghadapi tekanan yang semakin berat. Tapi, Presiden Soeharto tetap merupakan sekutu favorit Barat serta kekuasaan di tingkat regional, dan baru sesudah ia jatuh dari kekuasaan pada 1998 dimungkinkan terjadinya perubahan nyata. Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tetap menangani masalah ini selama pendudukan, meningkatkan kegiatannya dan akhirnya memperantarai capainya Kesepakatan 5 Mei 1999 yang menghasilkan Jajak Pendapat pada 30 Agustus 1999, saat rakyat Timor-Leste memilih kemerdekaan.

27. Sementara masyarakat internasional akhirnya mendukung hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dengan mendukung Jajak Pendapat, sekali lagi mereka gagal memahami hakikat sebenarnya dari pendudukan Indonesia. Tanggung jawab atas keamanan untuk Jajak Pendapat diserahkan kepada kepolisian Indonesia yang dikenal tunduk pada militer Indonesia, yang tidak hanya terus ditugaskan di wilayah ini tetapi juga dengan terang-terangan menumbuhkan milisi Timor-Leste sebagai instrumen dari strategi yang dimaksudkan untuk menjamin kemenangan kekuatan pro-integrasi. Akibatnya sudah bisa dibayangkan sebelumnya. Rakyat Timor-Leste menolak tunduk pada ancaman, intimidasi, dan kekerasan; mereka memilih kemerdekaan. Ketika hasil pemungutan suara diumumkan, militer Indonesia dan milisinya melancarkan pembalasan yang telah mereka ancamkan, dengan hasil malapetaka. Tapi, kali ini banyak pemerintah tidak mampu mengabaikan kontras antara keberanian luarbiasa dan martabat yang diperlihatkan oleh para pemilih Timor-Leste dan penghukuman yang luarbiasa kejam yang diberikan oleh TNI serta mitra Timor-Lestinya.

Pertemuan kembali: rekonsiliasi

28. Sejak awal proses dekolonisasi di Timor-Leste, ketika berbagai perkumpulan politik dibentuk dan muncul banyak perbedaan, ada upaya-upaya untuk menjembatani beragam perbedaan ini dan bekerjasama untuk kepentingan nasional yang lebih luas. Ketika para anggota berbagai partai politik utama saling menyerang secara lisan melalui siaran radio, sebagian lain yang melihat adanya bahaya, mengadakan pertemuan untuk merundingkan koalisi yang berumur pendek antara

UDT dan Fretilin. Ketika persekutuan ini terancam pecah, beberapa anggota dari kedua partai itu berusaha keras untuk membuatnya bertahan. Komisi mendapatkan keterangan bahwa bahkan selama Agustus - September 1975 ketika harapan akan perujukan terburu-buru dihancurkan oleh gerakan bersenjata UDT dan “perang saudara” yang tanpa terduga dikobarkannya, beberapa orang berupaya membuka dialog antara berbagai partai yang bertikai. Dalam bulan-bulan awal setelah invasi, ketika makna invasi yang sejati menjadi nyata bagi banyak orang Timor-Leste pendukungnya, Komisi juga mendapatkan keterangan mengenai adanya upaya diam-diam untuk rujuk antara pihak-pihak yang bermusuhan dalam perang saudara. Upaya-upaya awal ini gagal, tetapi mereka adalah pelopor dari pertumbuhan yang perlahan dan terus berlangsung dari suatu kesadaran nasional sejati yang ditempa dalam perjuangan panjang penentuan nasib sendiri.

29. Pada tahun-tahun pendudukan, Resistansi menjadi gerakan inklusif yang mencari cara untuk melibatkan orang Timor-Leste dari semua latar belakang politik dan orang-orang yang tanpa kesetiaan partai, termasuk anggota-anggota Gereja Katolik. Ketika Resistansi bergeser dari ideologi garis keras pada dasawarsa 1980-an dan mengambil strategi ‘persatuan nasional,’ gerakan ini merangkul semua pihak yang mendukung penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste. Sejak awal dasawarsa 1980-an, anggota-anggota UDT dan Fretilin di pengasingan mulai bekerja bersama untuk memengaruhi masyarakat internasional. Jalan ke perujukan tidaklah lancar—tapi tekad bersama pada kebebasan dan penentuan nasib sendiri memelihara upaya-upaya ini. Secara kelembagaan, Resistansi bergeser dari kepemimpinan partai tunggal Fretilin ke Conselho Revolucionário de Resistência Nacional (Dewan Revolusioner Resistansi Nasional, CRRN), kemudian Conselho Nacional de Resistência Maubere (Dewan Nasional Resistansi Maubere, CNRM), dan akhirnya Conselho Nacional de Resistência Timorese (Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor, CNRT)—dan setiap pergeseran menandai perluasan gerakan yang semakin besar untuk merangkul semua orang Timor-Leste yang bertekad sama. Generasi baru dasawarsa 1980-an dan 1990-an semakin mengadopsi perspektif yang nasionalis non-partisan mengenai perjuangan.

30. Lebih jauh lagi, Resistansi belajar tentang kekuatan dialog damai sebagai sarana menciptakan pemahaman bersama dan membangun kepercayaan. Pada 1983, gerakan Resistansi memperkenalkan rencana damai yang pertama dan pada awal 1990-an CNRM menyebarluaskan rencana perdamaian yang mengusulkan dialog tanpa syarat untuk mencari penyelesaian konflik. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an, di bawah naungan PBB, orang Timor-Leste dari latar belakang pro-kemerdekaan dan pro-integrasi berkumpul untuk melakukan serangkaian pertemuan yang disebut All-Inclusive Intra-East Timorese Dialogue (Dialog Antar-Orang Timor-Leste Mencakup Semua). Ketika perubahan benar-benar terlihat mungkin di Timor-Leste pada 1998, tapi terancam oleh kekerasan, para Uskup Katolik di Timor-Leste mempertemukan para pemimpin pro-kemerdekaan dan pro-integrasi dalam suatu pertemuan yang dikenal sebagai Dare I. Pertemuan kedua, disebut Dare II, diselenggarakan di Jakarta pada 1999, ketika kekerasan menghadapi Jajak Pendapat pada risiko.

31. Bisa saja dikatakan bahwa kekerasan September-Oktober 1999 membuat gagalnya inisiatif-inisiatif tersebut. Tapi, pernyataan itu tidaklah tepat, karena selama 25 tahun ada orang-orang Timor-Leste yang berjuang untuk menemukan penyelesaian damai untuk mengatasi perpecahan, dan pada akhirnya, melalui Jajak Pendapat pada Agustus 1999, mayoritas sangat besar rakyat mendukung pendekatan ini. Kita perlu belajar dari ini, dan mengambil ilham dari upaya-upaya orang-orang Timor-Leste pembina perdamaian itu. Di masa depan, akan selalu ada perbedaan pandangan di antara kita dan dengan para tetangga kita. Kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, mengenai bagaimana kita mendekati perbedaan-perbedaan tersebut. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kita harus selalu memilih jalan damai. Dengan cara itu, kita dapat mengamankan masa depan kita, dan kita bisa menjadi cahaya terang bagi dunia. Pengetahuan kita mengenai masa lalu kita bisa membantu kita menciptakan masa depan yang damai.

Asas penyusunan Laporan

32. Bab-bab dalam Laporan ini disusun secara tematis. Ada sejumlah bab yang memberikan informasi latar yang mutlak bagi pemahaman tentang konteks dan sebab-sebab pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam seluruh periode yang menjadi mandat Komisi: misalnya, Bagian 3: Sejarah Konflik; Bagian 4: Rezim Pendudukan; Bagian 5: Gerakan Resistansi: Struktur dan Strategi. Bagian utama Laporan ini ada pada Bagian 7, yang disusun secara tematis ke dalam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia utama yang terjadi dalam periode mandat. Di dalam setiap bab dalam bagian ini, pelanggaran-pelanggaran dibahas dalam struktur yang membagi periode mandat menjadi tujuh tahap utama, yaitu:

- April 1974 - September 1975: konflik politik internal dan bersenjata
- September 1975 - Januari 1976: periode administrasi Fretilin, masa setelah konflik internal, dan penyusutan Indonesia
- Desember 1975, invasi penuh Indonesia
- 1976 - 1979: periode operasi-operasi besar militer Indonesia dan Resistansi bersenjata yang dipimpin oleh Fretilin
- 1980 - 1984: periode “konsolidasi” militer Indonesia dan pembangunan kembali Resistansi
- 1985-1998: periode “normalisasi”
- 1999: periode menuju dan setelah Jajak Pendapat 30 Agustus 1999

Kebenaran

33. Mandat Komisi adalah menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste sepanjang 25 tahun periode mandatnya. Jangkauan mandat ini mencakup penentuan faktor-faktor seperti konteks, sebab, latar belakang, alasan, dan pandangan yang memicu terjadinya kekerasan, baik

berupa bagian dari pola pelanggaran yang sistematis, identitas orang-orang, pihak-pihak yang berwenang, lembaga-lembaga, dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam pelanggaran, dan apakah pelanggaran merupakan akibat dari perencanaan, kebijakan, atau pengesahan oleh pihak negara, kelompok-kelompok politik, kelompok-kelompok militer, gerakan pembebasan atau kelompok-kelompok atau orang-orang lain.¹ Komisi juga diberi mandat untuk mempelajari peran faktor-faktor internal dan eksternal, dan menentukan pertanggungjawaban untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi (Regulasi 10/2001, Pasal 3: lihat Bagian 2: Mandat Komisi).

34. Komisi bukanlah pengadilan dan tidak membuat dakwaan-dakwaan terhadap orang-orang atau mengenai kasus-kasus perorangan. Tapi, kerja Komisi untuk menetapkan kebenaran telah melibatkan pengumpulan berbagai macam bahan yang merupakan bukti kuat mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam waktu yang menjadi mandatnya. Menurut mandat Komisi, kebenaran ini memiliki beberapa kegunaan. Misalnya:

- Memperjelas peristiwa-peristiwa yang sampai sekarang banyak tidak dilaporkan atau bahkan ditutup-tutupi;
- Mendorong penyelidikan lebih lanjut oleh berbagai negara, organisasi internasional, dan lain-lain yang bisa mengarah pada penuntutan hukum dan dengan demikian memajukan perjuangan melawan impunitas untuk kejahatan-kejahatan berat;
- Membantu korban memulihkan martabat mereka, melalui berbagi dengan bangsa dan masyarakat internasional kebenaran yang sampai sekarang ditindas dan dengan demikian tidak dimengerti atau mungkin tidak dipercayai;
- Memahami dengan lebih baik kekuatan-kekuatan yang telah membentuk masyarakat dan bangsa Timor-Leste, dan menarik pelajaran dari masa lalu yang bisa mengembangkan budaya perdamaian dan penghormatan pada hak asasi manusia dan penegakan hukum;
- Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mengenai masa lalu pada seluruh warganegara Timor-Leste, khususnya di kalangan orang muda dan generasi muda, sehingga dengan mengingat dan menghormati penderitaan rakyat kita selama tahun-tahun konflik, kita belajar menghargai tantangan-tantangan berat yang mereka hadapi, bagaimana mereka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dan secara khusus menghargai orang-orang yang telah memberikan sumbangsih bagi kebebasan dan perdamaian abadi di negeri kita.

35. Kebenaran yang terkandung dalam Laporan ini banyak berasal dari pernyataan orang-orang yang secara langsung mengalami tahun-tahun konflik. Komisi memberikan arti penting khusus pada mendengarkan langsung orang-orang yang telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia sepanjang masa 25 tahun, yang kebanyakan belum berbicara di luar lingkaran kecil keluarga mereka.

Suara-suara yang banyak ini, dari seluruh wilayah negeri, telah memberi Timor-Leste harta yang tak bisa dinilai harganya. Mereka memberi tahu kita siapa kita, apa yang telah kita lalui, apa yang telah hilang dari kita, dan memperlihatkan nilai dari apa yang telah kita capai. Dari kisah-kisah saudara-saudara kita, kita belajar bahwa kemenangan bukanlah masalah sederhana pahlawan lawan penjahat; bahwa sejarah adalah lebih daripada sekadar daftar peristiwa besar atau riwayat hidup orang-orang besar. Pengalaman “orang biasa,” dari banyak orang yang telah mati atau yang masih hidup, memberi tahu kita dari mana asal kita dan membantu kita mengerti siapa kita kini. Dari kisah-kisah mereka, kita melihat dengan lebih jelas kedua ekstrem martabat manusia dan kemerosotan manusia yang terwujud di negeri ini selama 25 tahun. Kita harus belajar dari kedua sisi kisah manusia ini. Kita harus mengakui potensi kita untuk berada di kedua ekstrem tersebut, dan berusaha selalu memberikan yang terbaik dari kemanusiaan kita kepada hidup dan hubungan kita – keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita—setiap hari ketika kita membangun masa depan baru.

Asal-mula Komisi

Lokakarya dan Kongres CNRT

36. Pada Juni 2000, perwakilan masyarakat sipil Timor-Leste, Gereja Katolik, dan pemimpin masyarakat dengan Kantor Hak Asasi Manusia misi UNTAET menyelenggarakan lokakarya untuk membahas mekanisme peradilan transisi. Salah satu agendanya adalah mengkaji kelayakan pendirian sebuah komisi pencarian kebenaran bagi Timor-Leste. Lokakarya tersebut kemudian merekomendasikan untuk mengajukan proposal kepada Kongres Nasional pertama CNRT (Conselho Nacional da Resistência Timorense) pada Agustus, tentang pendirian komisi yang diberi mandat untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran di masa lalu serta mendorong rekonsiliasi.

37. Kongres tersebut dihadiri perwakilan konstituen distrik, subdistrik, dan desa berdasarkan jaringan CNRT. Semua faksi di Timor-Leste yang telah mendukung kemerdekaan, berdiskusi dan mengajukan kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan visi mengenai masa depan. Salah satu hasilnya adalah pengakuan resmi bahwa kolonisasi dan pendudukan militer yang berkepanjangan telah mengakibatkan kerusakan serius pada jalinan sosial dan identitas budaya bangsa ini. Komisi III Kongres ini, yang kewenangannya mencakup, antara lain, pembangunan sosio-kultural, mencatat bahwa di masa mendatang, kebijakan-kebijakan nasional tentang pembangunan sosial dan budaya harus “diarahkan kepada pembentukan masyarakat Timor-Leste yang didasarkan pada nilai-nilai universal, yang akan membawa pada terbentuknya masyarakat yang modern, lebih bermartabat, lebih manusiawi, dan adil.”²

38. Kongres CNRT menetapkan visi rekonsiliasi sebagai berikut:

Rekonsiliasi adalah sebuah proses, yang mengakui kesalahan masa lalu termasuk penyesalan dan pemberian maaf, sebagai hasil dari jalan yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian keadilan; rekonsiliasi adalah juga sebuah proses yang harus melibatkan Rakyat Timor-Leste, sehingga lingkaran saling tuduh bisa diputus. Proses ini tidak bisa dipandang hanya sebagai upaya penyelesaian konflik, atau sekadar alat politik yang bermaksud untuk menenangkan dan mengintegrasikan kembali individu-individu atau kelompok-kelompok dalam konteks penerimaan mereka terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Timor-Leste, namun, yang utama, harus dilihat sebagai proses yang harus menghasilkan kebenaran.

39. Dengan suara bulat, Kongres merekomendasikan berdirinya “Komisi untuk Pemukiman Kembali dan Rekonsiliasi Nasional”. Komite Pengarah yang bertugas untuk merancang proposal pun dibentuk. Komite ini terdiri atas perwakilan CNRT, LSM hak asasi manusia Timor-Leste, organisasi pemuda, Gereja Katolik - Komisi Keadilan dan Perdamaian, Asosiasi Eks-Tahanan Politik (Assepol), Falintil, UNTAET, dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Komisaris Tinggi PBB bagi Pengungsi). Tugas pertama Komite tersebut adalah melaksanakan konsultasi dengan masyarakat di seluruh Timor-Leste, demikian juga dengan para pengungsi Timor-Leste di Timor Barat serta daerah lainnya di Indonesia. Tujuan konsultasi ini adalah untuk mengumpulkan informasi untuk mendapatkan pemahaman tentang sikap dan pandangan rakyat Timor-Leste terhadap hal-hal yang menyangkut rekonsiliasi.

40. Sesuai Kongres tersebut, misi UNTAET diminta bantuannya. Sérgio Vieira de Mello, Administrator Transisi, menominasikan Unit Hak Asasi Manusia misi UNTAET untuk berperan atas nama PBB dalam mendukung Komite Pengarah.

41. Komite Pengarah lalu mengadakan konsultasi lebih lanjut dengan komunitas-komunitas di seluruh Timor-Leste dari September 2000 sampai Januari 2001. Komite ini mengunjungi 13 distrik, mengadakan pertemuan publik di tingkat distrik, subdistrik, dan desa. Mereka juga berkonsultasi dengan partai-partai politik, ahli-ahli hukum, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Mereka mendapatkan dukungan komunitas yang luarbiasa bagi sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Hasil konsultasi publik Komite Pengarah

42. Tema-tema berikut didapat dari konsultasi-konsultasi Komite Pengarah.

Pencarian Kebenaran dan Keadilan:

1. Keadilan harus ditegakkan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan berat.

2. Adalah penting bagi masa depan Timor-Leste untuk belajar dari sejarah konflik. Menyelidiki masa lalu dan menegakkan kebenaran perlu dilihat sebagai sesuatu yang mendasar dalam upaya yang kukuh untuk membangun negara. Walaupun demikian, membuka luka lama memiliki risiko tersendiri, dan menggali masa lalu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bila tidak, pengungkapan duka-duka lama hanya akan menimbulkan kemarahan, salah-menyalahkan, atau bahkan tindak kekerasan baru.
3. Walaupun kasus-kasus pelanggaran berat paling banyak terjadi selama masa pendudukan panjang oleh kekuatan militer Indonesia, masih ada risiko terjadinya kembali kemarahan yang belum tertuntaskan, terkait konflik antarpantai 1974 - 1975. Menyelidiki dan melaporkan kebenaran tentang pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota UDT, Fretilin, dan Falintil, termasuk para individu yang sekarang memegang posisi senior di pemerintahan, angkatan bersenjata, dan kepolisian, menjadi tantangan tersendiri.
4. Masih ada sisa-sisa kemarahan dari para pendukung kemerdekaan terhadap mereka yang berpihak pada kekuatan pendudukan Indonesia, serta terhadap para mantan anggota kelompok-kelompok milisi. Perlu diambil langkah-langkah praktis untuk mengurangi ketegangan tersebut.
5. Banyak pendukung otonomi merasa perlu adanya pendidikan umum tentang prinsip-prinsip toleransi politik. Mendukung sebuah tujuan politik otonomi bukanlah kejahatan, dan orang-orang yang mendukung posisi politis tersebut tidak boleh dihukum dengan cara apa pun.
6. Banyak perempuan korban perkosaan mendukung ide tentang adanya komisi yang memiliki fungsi pencarian kebenaran.
7. Para anggota keluarga dari mereka yang menghilang meminta bantuan dalam usaha mereka mengetahui nasib orang-orang yang mereka cintai.
8. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas tindakan para petugasnya, khususnya para anggota pasukan keamanan dan kakitangannya, warga Timor yang ada di bawah kendali mereka. Tanggung jawab tersebut harus termasuk pembayaran kompensasi bagi para korban dari pelanggaran yang disponsori oleh pemerintah ini.
9. Perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Portugal, dan Indonesia harus diselidiki sehubungan dengan persetujuan-persetujuan 5 Mei yang menetapkan syarat dan kondisi penyelenggaraan Jajak Pendapat. Persetujuan ini memberi tanggung jawab kepada Pasukan Indonesia atas keamanan selama Jajak Pendapat 1999, sementara para anggota dari kekuatan ini diketahui sebelumnya pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara luas.

Rekonsiliasi:

1. Pandangan bahwa rekonsiliasi adalah sesuatu yang mungkin terjadi, diterima secara luas, namun harus ada akuntabilitas dan keadilan bagi kejahatan berat di masa lalu, termasuk yang terjadi sebelum 1999.

2. Kebutuhan rekonsiliasi pada tingkat desa tidak boleh terlewatkan. Muncul ungkapan ketidakpuasan bahwa upaya rekonsiliasi sampai saat itu hanya difokuskan pada para pemimpin. Perlu ada upaya yang terorganisasi untuk mencoba menyelesaikan perselisihan masa lalu pada tingkat akar-rumpun.
3. Para tetua desa atau pemimpin tradisional dan sistem tradisional harus dilibatkan dalam proses penerimaan dan rekonsiliasi.
4. Gereja Katolik dan budaya pengakuan dosa dan pemberian maaf dapat memegang peranan penting dalam proses rekonsiliasi di tingkat komunitas.
5. Komisi harus melibatkan para pengungsi di Timor Barat. Komisi harus menjalankan program penyebaran informasi di Timor Barat untuk meluruskan informasi salah yang disebar ke pengungsi tentang kondisi di Timor-Leste.

Mendukung para korban:

1. Dukungan bagi rehabilitasi para korban, misalnya para mantan tahanan politik dan korban penyiksaan, harus diberikan dan kompensasi bagi para korban harus dipertimbangkan.
2. Para korban dengan sangat kuat menyatakan bahwa mereka menuntut pertanggungjawaban dan keadilan, serta menentang segala usulan amnesti.
3. Para Komisararis harus tahu tentang hak asasi manusia dan dihormati di komunitas.
4. Komisi harus beroperasi di tingkat desa dan harus melakukan penyuluhan tentang sifat pekerjaannya kepada masyarakat.
5. Komisi bukanlah pengganti peran sistem peradilan formal dan pengadilan. Selayaknya Komisi bekerja berdampingan dengan proses pengadilan untuk mendukung baik keadilan maupun rekonsiliasi.
6. Muncul kekhawatiran mengenai kemampuan Komisi untuk menangani banyaknya kejahatan dan pelanggaran selama 24 tahun konflik.

Memilih nama Komisi

43. Pada pertemuan-pertemuan Komite Pengarah terjadi debat panjang mengenai nama Komisi; bahwa baik kebenaran maupun rekonsiliasi harus ada di dalam nama tersebut disetujui dengan cepat. Tapi, Komite merasa bahwa nama tersebut harus mencerminkan nilai-nilai filosofis, budaya, dan spiritual warga Timor-Leste, yang penting dalam peran Komisi untuk memulihkan perpecahan antara berbagai individu dan kelompok. Nilai-nilai tersebut dapat dideskripsikan, namun sulit untuk diungkapkan dalam satu kata. Pada akhirnya disetujui bahwa kata bahasa Portugis, yakni 'acolhimento', paling tepat mencakup nilai-nilai tersebut. Walau memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, 'penerimaan', dan dalam bahasa Inggris 'reception', istilah *acolhimento* memiliki konotasi yang lebih luas daripada itu, termasuk di dalamnya adalah penyambutan, penerimaan, keramahtamahan, dan pemberian maaf. Dalam budaya Timor, kata tersebut berhubungan dengan sikap santun resmi yang ditujukan kepada orang lain

sebagai manusia yang memiliki keunikan martabat, takdir, dan identitas spiritual. Ini memberi kemampuan bagi masyarakat untuk menerima dengan terhormat orang-orang yang bahkan telah merugikan mereka di masa lalu. Karena tugas Komisi adalah untuk meluluhkan pembatas antara pelaku dan korban dari konflik politik, kata tersebut kemudian dimasukkan ke dalam nama Komisi. Dalam diskusi-diskusi Komite Pengarah makna dari *acolhimento* ini dibandingkan dengan kisah alkitab tentang seorang anak hilang, yang diterima kembali dengan kegembiraan dan hati yang lapang.

Regulasi Nomor 10/2001, Pembentukan Komisi

44. Komite Pengarah menggunakan rekomendasi yang dihasilkan dari konsultasi, mendebatkan masalah kebijakan, dan merumuskan rancangan undang-undang untuk mendirikan komisi melalui upaya intensif selama tiga bulan. Bantuan teknis disediakan oleh UNTAET dan International Center for Transitional Justice (ICTJ).^{*} Penulisan rancangan Regulasi sangat banyak menggunakan hasil konsultasi komunitas; hasil-hasil ini tertuang dalam mandat dan metodologi Komisi.

45. Pada saat rancangan Regulasi tengah dipersiapkan, UNTAET masih memegang penuh kewenangan administratif. UNTAET mendapat mandat untuk membantu mempersiapkan Timor-Leste menuju kemerdekaan. Sebagai satu langkah transisi dibentuk sebuah Dewan Nasional, yang mencakup keterwakilan luas dari partai-partai politik di Timor-Leste, komunitas religius, dan dari masyarakat sipil. Setelah menerima hasil pengesahan kabinet, rancangan legislasi kemudian diajukan ke Dewan Nasional. Rancangan ini memuat semua perincian pertimbangan dari komite khusus Dewan Nasional.

46. Wakil-wakil dari Komite Pengarah hadir di hadapan sidang pleno Dewan Nasional untuk menjelaskan rencana undang-undang yang tengah diajukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota Dewan. Walaupun tampak adanya antusiasme bagi proposal tersebut, dan ia disetujui secara prinsip oleh seluruh anggota Dewan, hal-hal yang ditangani proposal ini menimbulkan debat yang amat berarti dan kadang emosional.

47. Sebagian besar anggota Dewan ingin dilibatkan dalam proses pertimbangan teknis Regulasi tersebut sehingga tidak meneruskan rancangan ini kepada komite khusus mana pun. Alih-alih, sebuah komite baru dibentuk khusus untuk membahas rancangan Regulasi ini dan memungkinkan adanya diskusi-diskusi yang lebih terperinci. Dewan Nasional akhirnya mengesahkan rancangan tersebut setelah membahasnya selama satu bulan. Regulasi tentang pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) akhirnya disahkan oleh Dewan Nasional pada 13 Juni 2001.[†] Dewan Nasional kemudian mengajukan rancangan akhirnya kepada Administrator Transisi dengan rekomendasi agar dia mengukuhkan

.....
^{*} ICTJ adalah organisasi non-pemerintah yang berbasis di New York, membantu negara-negara yang tengah mengupayakan akuntabilitas bagi kejahatan massal atau pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. www.ictj.org

[†] Anggota Dewan Nasional terdiri atas 32 orang; 30 orang mendukung regulasi tersebut, satu orang abstain, dan satu orang menolak.

rancangan tersebut sebagai undang-undang. Administrator Transisi, Sérgio Vieira de Mello, mengukuhkan undang-undang ini pada 13 Juli 2001.

48. Pendirian Komisi tersebut didukung oleh para pemimpin politik dari semua pihak, organisasi-organisasi non-pemerintah, Gereja Katolik dan komunitas keagamaan lainnya, misi PBB, UNHCR, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, badan-badan internasional lainnya, serta negara-negara donor. Dukungan bagi Komisi ini begitu tingginya, sehingga Komisi ini juga disebut di dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, pasal 162. Pada saat Konstitusi ditandatangani pada Mei 2002, Komisi telah memulai kerjanya.

Kantor Interim

49. Sebuah Kantor Interim didirikan pada Agustus 2001, setelah Regulasi nomor 10/2001 dikukuhkan. Tugas-tugas kantor ini adalah mendukung Komite Pengarah dalam mengimplementasikan proses seleksi untuk Komisaris Nasional dan mencari dukungan dana untuk pembentukan Komisi dan mencari tempat untuk kantor Komisi di tingkat regional dan nasional. Kantor Interim didukung oleh Unit Hak Asasi Manusia UNTAET dan mempekerjakan sebuah tim kecil, yang dipimpin oleh Pat Walsh dari Unit Hak Asasi Manusia sebagai Direktur Eksekutif, dan Jacinto das Neves Raimundo Alves dan José Estevão Soares, sebagai Penasihat Kebijakan Senior. Kantor Interim berkantor di bekas Balai Pendidikan Guru (BPG), yang dulunya digunakan sebagai Markas UNAMET dan belakangan Markas CNRT, di Balide, Dili.

Dewan Penasihat CAVR

50. Pada 2002, Dewan Penasihat CAVR dibentuk untuk menyediakan saran dan masukan bagi para Komisaris Nasional. Para anggota yang berasal dari Timor-Leste adalah Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo, SDB; Uskup Basilio do Nascimento; Madre Zulmira Osorio Soares; José Ramos-Horta; Pastora Maria de Fatima Gomes; dan Ana Pessoa Pinto. Para anggota internasionalnya yakni Sérgio Vieira de Mello, Ian Martin, Saparinah Sadli, dan Munir SH.

51. Komisi mengenang dengan kesedihan bahwa dua dari anggota internasional Dewan Penasihat CAVR telah dibunuh pada masa kerja Komisi.^{*} Komisi memberikan penghargaan pada dedikasi dan keberanian Sérgio Vieira de Mello serta Munir SH, dua orang sahabat dan pendukung CAVR, yang hidup dan wafat bagi prinsip-prinsip dan komitmen mereka sebagai pelindung hak-hak asasi manusia.

.....
* Sérgio Vieira de Mello, yang pernah bertugas sebagai Administrator Transisi di Timor-Leste dari 25 Oktober 1999 sampai 20 Mei 2002 selama periode Administrasi UNTAET, adalah Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ketika beliau meninggal dalam sebuah ledakan bom di kantor pusat PBB di Baghdad pada 19 Agustus 2003, saat ia sedang memimpin misi PBB untuk Irak. Munir SH, seorang pengacara hak asasi manusia Indonesia, dikenal atas perannya dalam perjuangan menentang kekerasan yang disponsori militer di Indonesia. Beliau adalah pendiri Kontras, Komisi untuk Orang-orang Hilang dan Korban Kekerasan, dan ketua Imparsial, Human Rights Watch Indonesia. Beliau meninggal akibat diracun arsenik dalam penerbangan menuju Belanda pada 7 September 2004.

Pembentukan Komisi

Komisaris Nasional

52. Konsultasi langsung dengan masyarakat Timor-Leste pada masa pembentukan komisi berperan penting untuk mendirikan dan mempertahankan legitimasi Komisi di mata publik. Adalah sangat penting untuk menjaga unsur ini untuk dapat menyelesaikan mandat Komisi dengan baik. Bagian 4 dari Regulasi nomor 10/2001 memberi wewenang kepada Administrator Transisi untuk menunjuk antara lima sampai tujuh orang Komisaris Nasional, termasuk setidaknya 30% perempuan, atas saran Panel Seleksi yang terdiri atas para wakil partai-partai politik utama dan kelompok masyarakat sipil yang relevan.^{*} Setelah pembentukannya, Panel Seleksi mengunjungi seluruh Timor-Leste dan ke Indonesia untuk mengumpulkan nominasi untuk posisi Komisaris Nasional dan Regional. Selain itu, organisasi politik, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil, serta beragam kelompok komunitas dalam jumlah yang besar juga berpartisipasi dalam proses pencalonan.

53. Regulasi memberikan kuasa kepada Panel Seleksi untuk memasukkan sebanyak-banyaknya dua orang ‘anggota internasional’ sebagai Komisaris Nasional. Sejumlah kecil warga negara asing dengan pengalaman baik dalam bidang hak asasi manusia dinominasikan. Namun Panel Seleksi memutuskan bahwa sebaiknya warga Timor-Leste yang dinominasikan secara umum yang pada akhirnya akan bertanggung jawab mengenai kebijakan, program, dan temuan Komisi, dan hanya orang-orang yang telah mendapat pengakuan dari publik selama konsultasi masyarakat yang dapat ditunjuk sebagai Komisaris Nasional.

54. Pada 21 Januari 2002, Administrator Transisi, Sérgio Vieira de Mello, mengambil sumpah jabatan calon-calon yang direkomendasikan oleh Panel Seleksi sebagai Komisaris Nasional. Mereka yang ditunjuk adalah Aniceto Guterres Lopes, Padre Jovito do Rêgo de Araújo, Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, Jacinto das Neves Raimundo Alves, José Estevão Soares, Pendeta. Agostinho de Vasconcelos, serta Isabel Amaral Guterres. Komisi mengadakan pertemuan resmi pertamanya pada 4 Februari 2002, ketika Ketua serta Wakil Ketua dipilih dan pos portofolio khusus disetujui, yakni sebagai berikut:

^{*} Para anggota panel seleksi antara lain João Francisco Amaral, Maria Barreto, Francisco Miranda Branco, Patrick Burgess, Brígida Correia, Jacinto Alves Correia, Quiteria da Costa, Adelino Freitas, Cecílio Caminha Freitas, Jacob Martins dos Reis Fernandes, Galuh Wandita Soedjatmoko, dan Julião Mausiri. Bagian 4 dari Regulasi mensyaratkan bahwa Panel Seleksi memasukkan seorang wakil dari empat partai politik, yakni Partido Trabalhista, Partido KOTA, Fretilin, dan UDT; seorang wakil dari kelompok pro-otonomi (akan dinominasikan oleh Administrator Transisi setelah berkonsultasi dengan kelompok-kelompok pro-otonomi); Forum LSM; jaringan perempuan Rede; organisasi pemuda Presidium Juventude; Asosiasi Eks-Tahanan Politik (Assepol); Asosiasi Keluarga Orang-orang Hilang; nominasi bersama Dioses Dili dan Dioses Baucau; serta Kantor urusan Hak Asasi Manusia UNTAET. Bagian 4.3 mengharuskan Panel untuk menjalankan konsultasi yang luas dalam seleksi Komisaris, mencakup proses nominasi publik.

1. Ketua: Aniceto Guterres Lopes
2. Wakil Ketua: Padre Jovito do Rêgo de Araújo
3. Bendahara: Maria Olandina Isabel Caeiro Alves
4. Portofolio Pencarian Kebenaran: Jacinto das Neves Raimundo Alves dan José Estevão Soares
5. Portofolio Rekonsiliasi Komunitas: Pendeta Agostinho de Vasconcelos dan Jacinto das Neves Raimundo Alves
6. Portofolio Penerimaan dan Dukungan Korban: Isabel Amaral Guterres

Profil Komisaris Nasional

Aniceto Guterres Lopes, Ketua

Aniceto lahir di Tapo, Maliana, Distrik Bobonaro pada 1967. Ia mempelajari hukum di Universitas Udayana. Ia anggota Renetil (Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste, Resistansi Nasional Pelajar Timor-Leste), organisasi pelajar untuk resistansi nasional sejak 1989. Ia menjabat Sekretaris Jenderal Yayasan ETADEP (East Timor Agriculture and Development Project, Proyek Pembangunan dan Pertanian Timor Timur), salah satu organisasi non-pemerintah Timor Timur pertama, dari 1992 sampai 1996. Aniceto adalah pendiri dan, sejak 1997, direktur organisasi non-pemerintah Timor pertama di bidang hak asasi manusia, yakni Yayasan HAK. Ia bekerja untuk memajukan keadilan di Timor-Leste pada tahap-tahap awal Administrasi Transisi PBB, bekerja pada Komisi Pelayanan Peradilan Transisi UNTAET dari Januari 2000, dan Pendiri Asosiasi Pengacara Timor-Leste pada April 2000. Ia juga anggota dari Dewan Nasional Timor-Leste (Oktober 2000 - Juli 2001). Ia ditunjuk sebagai Komisaris Nasional pada 2002. Aniceto adalah penerima Penghargaan Ramon Magsaysay untuk kategori Kepemimpinan Baru pada 31 Agustus 2003. Setelah mengajar selama beberapa tahun di Universidade Paz di Dili, ia ditunjuk menjadi Dekan Fakultas Hukum pada April 2005. Beberapa bulan kemudian dia ditunjuk oleh Presiden Xanana Gusmão sebagai salah seorang anggota Dewan Nasional. Pada Agustus 2005, dia ditunjuk menjadi salah seorang Komisaris untuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Padre Jovito do Rêgo de Jesus Araújo, Wakil Ketua

Padre Jovito lahir di Hatolia, Distrik Ermera, pada 1963. Ia telah menjadi pastor Katolik yang bertugas di Dili dan Aileu sejak 1996. Sebagai Presiden Komisi Pemuda Katolik dari Dioses Dili selama tiga

tahun sebelum ditunjuk menjadi anggota Komisi, ia telah menjalin hubungan yang erat dengan kalangan pemuda. Ia menjadi anggota Renetil sejak 1987. Ia memiliki minat khusus dalam advokasi hak asasi manusia khususnya dalam masalah kepemudaan. Pada September 2005, Padre Jovito melanjutkan pendidikannya di bidang Alkitab di Universitas Gregoriana, Roma, Italia.

Maria Olandina Isabel Caeiro Alves

Olandina berasal dari Distrik Ermera, tempat ia lahir pada 1956. Ia pengusaha wanita yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun untuk pelayanan publik, khususnya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dia pernah bekerja sebagai Anggota DPRD tingkat I Timor Timur pada 1997 - 1999, juga pernah ditunjuk sebagai anggota Komisi Nasional untuk Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan pada 1998. Olandina menjabat direktur organisasi East Timorese Women Against Violence and for Child Care (ET-Wave) sejak 1998. Sejak 1999 Olandina telah bekerja untuk beberapa posisi kepemimpinan seperti; sebagai Ketua Komisi Pelayanan Publik pada 2000 - 2001; dari 2003 sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Jaringan Perempuan Timor-Leste (Rede Feto Timor-Leste); Ketua Gerakan Pramuka Timor-Leste; dan Presiden Habitat for Humanity untuk Timor-Leste. Dia juga adalah pendiri Peace and Democracy Foundation pada 2002 dan sejak saat itu menjadi anggota dewan. Olandina juga menjalankan restoran "Olandina" di Dili. Pada Agustus 2005, dia ditunjuk menjadi salah seorang anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

José Estevao Soares

José lahir pada 1955 di Laclubar, Distrik Manatuto. Antara Oktober 1975 dan Mei 1976 dia ditahan sebagai tahanan politik oleh Fretilin, karena afiliasi politiknya kepada Partai Apodeti. José bekerja sebagai pegawai negeri pada pemerintah Indonesia di Timor Timur. Ia menjadi juru bicara pemerintah dan Kepala Hubungan Masyarakat (1993-1997), dan kemudian bekerja pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Timor Timur (BKPMDD). Pada 1999, dia adalah salah satu anggota pendiri organisasi politik pro-otonomi Forum Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan (FPDK). Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Timor Timur pada 1999. José meninggalkan Timor-Leste pada September 1999, dan melewati masa satu tahun sebagai pengungsi di Denpasar, Bali (Indonesia), sebelum kembali pada Oktober 2000. Sekembalinya ke Timor-Leste, ia langsung menjadi anggota Dewan Nasional Timor-Leste (Oktober 2000 - Juli

2001). José juga pernah menjabat sebagai Penasihat Senior kebijakan pada Kantor Interim yang mendukung pembentukan Komisi.

Isabel Amaral Guterres

Isabel lahir di Luca, Distrik Viqueque pada 1958. Ia pernah bekerja pada berbagai organisasi dalam bidang bantuan kemanusiaan, termasuk bekerja dengan Jesuit Refugee Services (JRS), memberi dukungan bagi orang-orang yang kembali ke Timor-Leste pada 1999. Sebelumnya Isabel tinggal di Australia selama 15 tahun, tempat ia belajar di Aquinas and Mercy Catholic University, Victoria, dan bekerja sebagai perawat. Pada Maret 1999, dia melakukan kunjungan singkat ke Timor-Leste dalam rangka melaksanakan seminar tentang resolusi konflik. Sekembalinya ke Timor-Leste pada November 1999, ia terus menggunakan pengalaman profesionalnya di bidang kesehatan dalam kerjanya dengan Médecins Sans Frontières (MSF) dan World Vision. Isabel menjabat sebagai anggota dewan Palang Merah Timor-Leste hingga saat ini, dan ditunjuk menjadi Komisaris Elektoral untuk pemilihan kepala desa dan anggota dewan pada 2004 dan 2005.

Pendeta Agostinho de Vasconcelos

Pendeta Agostinho lahir pada 1970 di Kaiualita, Distrik Baucau. Pdt. Agostinho menyelesaikan pendidikannya dalam bidang filsafat keagamaan dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Tomohon, Indonesia pada 1995. Ia bertugas sebagai Pendeta Gereja Protestan di Timor Timur (Igerja Protestante Timor-Leste - IPTL) pada 1996 dan juga sebagai pendeta di Gereja Maranatha di Distrik Baucau (1999 - 2000), dan Distrik Oecussi (1996 - 1999). Pdt. Agostinho juga pernah menjabat sebagai anggota dewan Yayasan Sosial Naroman (1999 - 2000), Ketua Pemuda Protestan (2000 - 2004), Sekretaris Editorial pada majalah *KeEsaan* (2001 - 2002), dan saat ini bekerja sebagai Sekretaris Eksekutif pada Departemen Keadilan dan Perdamaian Gereja Protestan di Timor-Leste. Ia mengikuti berbagai lokakarya dan kursus mengenai rekonsiliasi di Timor Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia dan terus terlibat secara aktif di beberapa LSM.

Jacinto das Neves Raimundo Alves

Jacinto lahir di Distrik Manatuto pada 1957. Pada 1979 dia bekerja untuk Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Jacinto pernah menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif Conselho Nacional da Resistência Maubere (CNRM) yang merencanakan Demonstrasi Santa Cruz. Setelah pembantaian Santa Cruz pada November 1991, dia ditahan. Dia menjalani hukuman selama tujuh tahun dari hukuman

sepuluh tahunnya di penjara dan dibebaskan pada 30 Desember 1998. Jacinto juga salah seorang anggota pendiri LSM Komisi Hak Asasi Manusia di Timor-Leste pada 1999 dan aktif menyediakan bantuan darurat untuk pengungsi di Dare setelah Jajak Pendapat pada September 1999. Kini sebagai Koordinator Asosiasi Eks-Tahanan Politik di Timor-Leste (Assepol) sejak awal 1999, Jacinto menjadi salah seorang dari dua orang perwakilan Assepol dalam Komite Pengarah yang mendirikan CAVR dan pada Juli 2001 sampai Januari 2002 menjabat sebagai Penasihat Kebijakan Senior untuk Kantor Interim yang mendukung pembentukan Komisi. Pada Maret 2005, Jacinto ditunjuk oleh Presiden Xanana Gusmão sebagai anggota Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan Nasional. Pada Agustus 2005, Jacinto ditunjuk oleh Presiden Xanana Gusmão sebagai salah seorang anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Prinsip-prinsip dan misi Komisi

55. Segera setelah pengukuhan mereka pada upacara pengambilan sumpah pada 21 Januari 2002, para Komisaris Nasional melakukan retret selama lima hari di Biara Karmel di Maubara, Distrik Liquiçá. Retret ini menjadi momen penting dalam perkembangan Komisi, ketika para Komisaris bertukar pandangan mengenai pemahaman mereka tentang mandat dan merumuskan serangkaian prinsip yang selanjutnya mendasari kerja CAVR. Prinsip-prinsip itu di antaranya:

1. Berkomitmen untuk memajukan standar-standar hak asasi manusia universal di Timor-Leste; Komisi bersifat netral secara politik dan independen. Ia akan berupaya untuk menjangkau warga Timor-Leste dari semua latar belakang politik di dalam Timor-Leste dan di Indonesia. Ia akan berupaya untuk menyelidiki secara objektif berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik politik, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi semasa konflik internal pada 1974 – 1976.
2. Menempatkan para korban pelanggaran hak asasi manusia sebagai titik-pusat kerjanya dan menciptakan institusi yang bersahabat dan terbuka bagi para korban tersebut. Komisi akan mengakui dan menghargai pengalaman masa lalu mereka. Ia juga akan mencari cara-cara praktis untuk membantu mereka dan mengangkat peran mereka dalam pembangunan bangsa
3. Sepakat bahwa rekonsiliasi tidak akan dapat tercapai tanpa keadilan. Komisi akan menghargai tuntutan keadilan yang dibuat oleh warga Timor-Leste biasa, khususnya para korban pelanggaran hak asasi manusia. Komisi akan berupaya memahami apa yang dimaksud oleh korban sebagai keadilan dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk membantu memulihkan martabat para korban, serta memperbaiki kekerasan yang rusak.

4. Sepakat bahwa menetapkan kebenaran dan akuntabilitas bagi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu adalah langkah penting untuk mencapai keadilan dan memulihkan martabat para korban.
5. Memahami bahwa rekonsiliasi dan pemulihan akan menjadi proses yang sulit dan panjang. Proses-proses ini memerlukan kontribusi aktif yang terus-menerus dari para keluarga, komunitas, dan organisasi-organisasi lain yang terlibat dalam pekerjaan yang sama. Dengan demikian, akan diupayakan penciptaan kemitraan dan komisi tidak akan menjadi institusi yang berdiri sendiri. Komisi akan berupaya untuk bekerja bagi rekonsiliasi dan menyumbang pada kelanjutan kerja semacam ini di luar mandatnya.
6. Mengakui pentingnya untuk memastikan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi. Ini berarti bahwa perempuan harus direkrut oleh Komisi dan bahwa anggota komunitas perempuan harus berpartisipasi dalam kegiatannya. Komisi mengakui bahwa terdapat kendala-kendala praktis, budaya, dan ekonomi bagi keikutsertaan perempuan, yang akan diusahakan untuk dapat diatasi.
7. Mengakui keragaman budaya Timor-Leste yang kaya seperti yang dijalankan dan diekspresikan di berbagai komunitas di penjuru negara. Komisi akan berusaha untuk memasukkan kekuatan nilai tradisional dan kebiasaan adat dalam kerjanya
8. Akan berupaya menjadi terbuka bagi warga Timor-Leste di seluruh negara dan di Indonesia dan bagi komunitas internasional yang lebih luas. Hal ini mengharuskan kerja di daerah-daerah paling terpencil di negara ini dan dalam bahasa setempat, serta dalam bahasa Inggris, Portugis, dan Indonesia.

Komisaris Regional

56. Para Komisaris Regional adalah wakil para Komisaris Nasional dan CAVR di distrik-distrik. Masyarakat setempat dengan mudah dapat berhubungan dengan Komisaris Regional yang dipilih untuk bekerja di distrik asal mereka, di lain pihak pada saat yang sama memberikan dukungan kepada tim-tim CAVR lainnya di distrik yang berdekatan. Hal ini sangat membantu dalam memfasilitasi keikutsertaan komunitas dalam program-program Komisi.

57. Peran para Komisaris Regional adalah untuk memimpin tim distrik masing-masing. Mereka memperkenalkan Komisi kepada masyarakat, khususnya kepada para pemimpin setempat. Para Komisaris Regional mengetuai panel pada audiensi rekonsiliasi komunitas. Mereka juga memainkan peran utama pada audiensi korban di subdistrik.

58. Regulasi mensyaratkan penunjukan antara 25 sampai 30 Komisaris Regional oleh Administrator Transisi, atas saran para Komisaris Nasional.³ Setelah melalui sebuah proses nominasi publik di masing-masing distrik, Administrator Transisi, Sérgio Vieira de Mello, mengambil sumpah 29 Komisaris Regional pada 15 Mei 2002. Sepuluh di antaranya adalah perempuan.

59. Berikut ini adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai Komisaris Regional oleh CAVR:

Wilayah Aileu

- Aileu: Francisco Martins, Meta Mendonca
- Manufahi: Jaime da Costa (mengundurkan diri 2002); Saturnino Tilman

Wilayah Covalima

- Ainaro: Filomena Barros Pereira, Alarico da Costa Reis
- Covalima: Antonio Alves Fahik, Maria Nunes

Wilayah Baucau

- Baucau: Carolina M E do Rosario, Aleixo Ximenes
- Manatuto: Geraldo Gomes, Ildefonso Pereira
- Lautém: Albino da Silva, Justino Valentin
- Viqueque: Helena H X Gomes, Daniel Sarmento Soares

Wilayah Bobonaro

- Bobonaro: Ana de Fatima Cunha, Francisco dos Reis Magno, Domingas dos Santos
- Ermera: Eduardo de Deus Barreto, Egidio Maia

Wilayah Dili

- Dili: Teresinha Maria Cardoso, Pedro Correia Lebre, Joanico dos Santos
- Liquiçá: Maria Fernanda Mendes, Ana Maria J. dos Santos

Wilayah Oecussi

- Oecussi: Antonio da Costa, José Antonio Ote, Arnold Sunny

Hal-hal dan tantangan operasional

Tantangan praktis bagi kerja Komisi

60. Tahap operasional mandat Komisi dimulai pada 7 April 2002. Komisi didirikan pada masa ketika infrastruktur fisik, ekonomi, dan logistik di Timor-Leste masih dalam tahap konstruksi dini. Menyusul keadaan darurat kemanusiaan di akhir 1999, UNTAET mulai mengimpor dan memasang peralatan yang esensial bagi operasinya, termasuk jaringan internet satelit dan sistem telepon seluler di Ibukota Dili. Tapi, ketika itu belum ada hubungan telepon darat, email, dan pos antara Dili dan distrik-distrik, atau pun antardistrik, dan hanya ada layanan telepon seluler terbatas ketika Komisi didirikan.

61. Jalan-jalan berada dalam kondisi yang sangat parah di banyak daerah pelosok dan sering tidak dapat dilalui pada musim hujan. Padahal, interaksi antara kantor nasional dan kantor distrik mengharuskan para wakil untuk melakukan perjalanan di antara kantor-kantor ini. Hanya ada sedikit perusahaan swasta yang beroperasi. Transportasi sederhana dan peralatan kantor sangat sulit didapat, dan barang sering harus diimpor dari luar negeri. Barang kebutuhan dasar, seperti kertas dan pena, hanya tersedia di Dili. Ketiadaan fasilitas perbankan di luar Dili menjadikan transfer dana untuk pembayaran gaji bulanan atau untuk memenuhi kebutuhan operasional menjadi suatu tantangan keamanan dan logistik.

62. Komunikasi dengan daerah kantong Oecussi dan Ataúro lebih sulit lagi. Daerah ini terisolasi dari wilayah Timor-Leste lainnya, dibatasi oleh laut dan perbatasan darat dengan Timor Barat, Indonesia. Perjalanan darat dari Timor-Leste menuju Oecussi sulit pasca-September 1999, dan semakin tidak memungkinkan setelah pembunuhan tiga staf internasional UNHCR di Atambua, Timor Barat, pada September 2000. Tidak ada layanan feri reguler ke daerah tersebut ketika Komisi didirikan. Satu-satunya hubungan udara yang ada disediakan oleh UNTAET, yang memprioritaskan transportasi staf dan barang PBB. Akses ke Pulau Ataúro, sebuah subdistrik dari Distrik Dili, juga menghadirkan tantangan logistik.

63. Komisi mengambil pandangan bahwa rekonsiliasi, pencarian kebenaran yang menyeluruh dan objektif, serta dukungan korban yang efektif, hanya dapat dicapai jika Komisi mengukuhkan kehadirannya di seluruh wilayah negara. Memastikan bahwa masing-masing tim distrik mendapatkan dukungan logistik yang cukup, termasuk fasilitas transportasi dan komunikasi, menjadi teramat penting untuk mewujudkan tujuan ini. Masalah-masalah ini terus menjadi tantangan yang berat bagi program-program distrik Komisi selama periode operasi.

Tantangan bahasa

64. Konstitusi Timor-Leste mengakui dua bahasa resmi, Tetum dan Portugis, dan dua bahasa kerja, Indonesia dan Inggris. Banyak bahasa dan dialek lain yang digunakan di penjuru negara. Kebutuhan bekerja dalam banyak bahasa menjadi tantangan besar bagi Komisi dan dalam penyiapan Laporan Akhirnya. Walaupun ada tantangan demikian, Komisi mengupayakan tingkat partisipasi setinggi mungkin dengan menganjurkan orang-orang untuk menggunakan bahasa yang paling nyaman bagi mereka.

65. Selama masa operasinya, Komisi menggunakan bahasa Indonesia, Tetum, dan Inggris untuk dokumen-dokumen tertulis, dan Tetum sebagai bahasa lisan utama. Bahasa Portugis tidak cukup banyak digunakan oleh staf atau klien, baik secara tertulis atau lisan, untuk layak digunakan sebagai bahasa kerja. Bahasa Tetum tidak pernah diajarkan secara resmi di sekolah-sekolah negeri sebelum 1999. Sebagian besar staf tidak merasa cukup percaya diri untuk menulis dokumen-dokumen yang kompleks atau resmi dalam bahasa Tetum. Karena isu bahasa ini, sebagian besar staf internasional yang membantu dalam program-program dan untuk Laporan Akhir dapat berbahasa Tetum atau Indonesia, atau keduanya, selain bahasa Inggris.

66. Kegiatan lapangan Komisi dijalankan dengan bahasa setempat atau *lingua franca*, yakni Tetum. Di beberapa komunitas pedalaman, Tetum tidak begitu umum digunakan. Perekrutan staf lokal menjadi penting bagi pemahaman dan penerimaan lokal. Pernyataan dan wawancara penelitian biasanya dilakukan dalam bahasa Tetum atau Indonesia, dan ditulis dalam salah satu dari kedua bahasa tersebut. Sistem pengkodean *database* menggunakan bahasa Indonesia; ringkasan pernyataan ditulis dalam bahasa Tetum, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pernyataan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas ditulis dalam bahasa Indonesia atau Tetum.

67. Program-program nasional, seperti audiensi publik dan lokakarya tematis, dijalankan dalam bahasa Tetum, dengan penerjemahan ke dalam bahasa Inggris. Orang-orang Indonesia yang memberi kesaksian pada audiensi publik berbicara dalam bahasa Indonesia. Beberapa saksi menyampaikan kesaksian dalam bahasa-bahasa regional dan diterjemahkan ke Tetum, demikian pula beberapa ahli internasional. Unit Kejahatan Berat menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kerjanya, sehingga pernyataan-pernyataan yang dikirim ke Kejaksaan Agung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk dapat dipertimbangkan oleh staf internasional PBB yang bekerja sebagai jaksa penuntut. Dalam penulisan Laporan Akhirnya, Komisi menggunakan materi berbahasa Inggris, Indonesia, Portugis, dan Tetum.

68. Masalah bahasa menjadi tantangan yang sangat berat bagi proses penulisan Laporan Akhir. Para penulis adalah orang Timor-Leste yang menulis dalam bahasa Indonesia, dan para penulis internasional, yang menulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Draf dari bab-bab Laporan Akhir ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia, lalu diterjemahkan dari salah satu ke yang lainnya sehingga akan tersedia bagi para editor dalam kedua bahasa. Draf berbahasa Inggris yang sudah disunting harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebelum diberikan kepada para Komisaris untuk disahkan. Draf lalu didiskusikan oleh para Komisaris dalam bahasa Indonesia, berbagai perubahan dilakukan, kemudian disahkan. Versi bahasa Inggrisnya kemudian disesuaikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis.

69. Proses menghasilkan Laporan Akhir dalam tiga bahasa ini sangat kompleks dan menghabiskan banyak waktu.

Pendekatan terpadu berbasis komunitas

70. Regulasi telah memberi kerangka kerja bagi Komisi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan spesifik yang berfokus pada pencarian kebenaran dan rekonsiliasi komunitas. Tujuan inti yang lain adalah untuk membantu memulihkan martabat korban. Pada dasarnya Komisi bertanggung jawab untuk merancang kebijakan dan kegiatan yang terbaik dalam mencapai tujuan yang dimandatkan.

71. Kehendak masyarakat yang terungkap dalam konsultasi Komite Pengarah terwujud dalam pendirian Komisi dan dalam syarat-syarat yang tertuang dalam Regulasi No. 10/2001. Kebutuhan-kebutuhan dan kehendak anggota masyarakat adalah untuk sedapat mungkin memberi arahan bagi pengembangan dan

implementasi kebijakan-kebijakan ini. Prinsip konsultasi komunitas ini terus berperan dalam membentuk keputusan-keputusan Komisi selama masa operasi mandatnya.

72. Konsultasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan terjadi pada tahap permulaan dan pada masa awal operasi. Hasilnya, sejumlah proyek percontohan dijalankan yang memberi informasi tambahan untuk merancang program-program yang efektif. Komisi menjalankan tiga proyek percontohan (lihat kotak di bawah) untuk membantu menentukan bagaimana mandat dapat dilaksanakan seefektif mungkin. Setiap proyek berfokus pada bidang kegiatan tersendiri di mana Komisi berencana untuk terlibat. Komisi terus membuka diri untuk usulan-usulan tambahan dari kalangan umum selama masa operasi.

Proyek percontohan mengenai pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, dan dukungan korban

Pencarian Kebenaran

Proyek percontohan pertama berfokus pada pencarian kebenaran di tingkat komunitas, khususnya proses pengambilan pernyataan. Proyek ini dilakukan di komunitas-komunitas di Pulau Ataúro, Dili (Dili) 28 Mei - 7 Juni, dan 22 - 30 Juni 2002. Tahap pengenalan dan persiapan disusul oleh pengambilan pernyataan yang menghasilkan 33 pernyataan dari para korban dan saksi, yang berhasil mendokumentasi sejumlah pelanggaran termasuk pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, dan pemindahan paksa.

Proyek percontohan ini menghasilkan pelajaran berharga dalam hal logistik dan metodologi. Komisi merevisi kebijakannya mengenai bahasa dalam pengambilan pernyataan, untuk memungkinkan pernyataan ditulis dalam bahasa Tetum atau Indonesia. Komisi juga memutuskan untuk merekam semua wawancara untuk menjamin keakuratan. Para pengambil pernyataan menemukan bahwa para saksi senang mendengar rekaman kesaksian mereka diputar kembali. Hal ini semakin memperkuat kepercayaan diri mereka mengenai keandalan cara Komisi dalam mendokumentasi pernyataan mereka.

Profil Komunitas

Komisi memfasilitasi sebuah diskusi komunitas mengenai dampak pelanggaran hak asasi manusia di Metinara di Distrik Dili pada 27 September 2003 sebagai proyek percontohan kedua. Diskusi yang

demikian selanjutnya dikenal sebagai lokakarya Profil Komunitas. Dua alat utama digunakan untuk memfasilitasi diskusi ini. Kegiatan pembuatan garis waktu timeline membantu memusatkan diskusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang dialami komunitas antara 1974 dan 1999. Sesi pembuatan peta melibatkan anggota komunitas untuk menggambar peta yang menunjukkan tempat-tempat utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai pertanyaan kemudian diajukan kepada komunitas mengenai dampak kolektif pelanggaran-pelanggaran ini, khususnya yang dialami perempuan dan anak-anak. Lokakarya semacam ini bermaksud untuk memberi sebuah perspektif komunitas mengenai dampak pelanggaran-pelanggaran. Hal ini akan melengkapi fokus individual dari pengambilan pernyataan dan untuk membantu mengkaji dampak kekerasan secara keseluruhan pada masyarakat Timor-Leste. Proyek percontohan ini memberi pelajaran berharga mengenai fasilitasi lokakarya komunitas dan metode-metode dokumentasi, yang membantu pelatihan staf selanjutnya.

Prosedur Rekonsiliasi Komunitas

Proyek percontohan ketiga adalah audiensi rekonsiliasi komunitas. Proyek ini pertama kali dilaksanakan oleh Komisi pada 23 Agustus 2002, di Maumeta, Distrik Liquiçá, tiga orang pelaku (deponen) berpartisipasi dalam audiensi yang dihadiri oleh sekitar 150 anggota komunitas, Komisaris Nasional, dan Jaksa Agung. Sembari memperkenalkan mandat Komisi dan dasar hukum bagi audiensi yang diselenggarakan, Komisaris Regional Ana Maria J. dos Santos mengetuai panel yang terdiri atas para pemuka setempat. Para deponen memberi kesaksian, mengakui kesalahannya kepada para korban dan anggota komunitas. Mereka bersumpah tidak akan pernah menggunakan kekerasan lagi untuk kepentingan politik. Para korban dan anggota komunitas lalu mendapat giliran berbicara, menceritakan versi mereka sendiri mengenai kejadian-kejadian yang digambarkan oleh para pelaku. Para tetua adat membersihkan lokasi dari roh-roh jahat, dan mengundang para pelaku serta korban untuk duduk bersama di atas *biti boot* (harfiahnya: tikar besar, tempat masyarakat menyelesaikan perselisihan secara adat).

Panel yang memimpin audiensi kemudian berembuk dengan para korban dan anggota komunitas, serta dengan para deponen. Diputuskan untuk menerima permintaan maaf para pelaku dan tidak menjatuhkan sanksi apapun. Audiensi ini menunjukkan kebaikan memadukan unsur-unsur proses hukum formal dengan prinsip-prinsip kebiasaan adat. Perpaduan dua sumber ini memberi prosedur ini legitimasi penuh di mata para anggota komunitas. Audiensi menunjukkan pentingnya unsur kepemilikan lokal dalam

menjalankan proses rekonsiliasi. Hal ini juga memperlihatkan tingkat pengorganisasian dan dukungan logistik yang diperlukan jika anggota komunitas dalam jumlah banyak akan menghadiri audiensi-audiensi di masa mendatang. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia saat itu, Mary Robinson, dan para pejabat senior UNMISSET juga menghadiri acara ini.

73. Komisi percaya bahwa kemajuan ke arah rekonsiliasi bergantung pada berbagai langkah praktis yang diambil untuk mendorong pemulihan. Syarat-syarat agar pemulihan ini terjadi mencakup mencari dan memublikasikan kebenaran sejarah, dan mengakui pengalaman para korban untuk membantu pemulihan emosi mereka. Berbagi pengalaman secara terbuka seperti ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bertikai, baik di tingkat akar-rumput maupun antara pemimpin lokal dan nasional, untuk berekonsiliasi. Pengambilan pernyataan, audiensi publik, dan pertemuan rekonsiliasi komunitas menghasilkan rekaman yang akurat dan mudah diakses mengenai kejadian-kejadian di distrik yang terkait konflik. Kegiatan-kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan ini mencakup:

- Pengambilan pernyataan dari para saksi dan korban pelanggaran di seluruh pelosok Timor-Leste dan Timor Barat
- Melakukan wawancara penelitian bersasaran dengan para saksi dan korban
- Menyenggarakan audiensi publik nasional dengan tema-tema yang penting menurut mandat dan memberikan audiensi tersebut publisitas seluas mungkin dengan menyiarkannya di radio dan televisi
- Melaksanakan prosedur rekonsiliasi komunitas
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencatat sejarah konflik di desa dan kampung mereka serta dampak spesifik konflik terhadap mereka
- Mengadakan audiensi korban di tingkat subdistrik sehingga para korban dapat menceritakan pengalamannya, agar keberanian dan penderitaan yang telah mereka alami dapat diakui
- Mengadakan lokakarya pemulihan di kantor nasional bagi para korban yang terkena dampak konflik secara serius. Mereka berbagi pengalaman dan berpartisipasi dalam penyuluhan kelompok dan kegiatan lain yang dirancang untuk mendorong pemulihan
- Memberikan reparasi mendesak untuk sejumlah korban yang paling membutuhkan bantuan pengobatan dan bantuan langsung lainnya
- Membuat dan menyiarkan program radio mingguan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rekonsiliasi
- Merancang dan mendorong suatu program informasi di kamp-kamp pengungsi Timor Barat

- Mengadakan kunjungan para Komisaris Nasional ke Timor Barat untuk bertemu dengan para pemimpin pro-otonomi di sana
- Mendirikan arsip dan perpustakaan untuk berbagai dokumen dan bahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan sejarah konflik yang dihasilkan dari kerja Komisi.

Rencana strategis

74. Mandat dan kegiatan Komisi seperti ini belum pernah ada dalam sejarah di Timor-Leste. Dalam menyusun kerangka kerja institusi, kebijakannya, kegiatan dan mekanisme dukungan administratifnya, para pendirinya tidak dapat menggunakan model yang sudah ada, pengetahuan tentang institusi sejenis, atau staf yang berpengalaman tentangnya. Staf Komisi menggunakan suatu rencana strategis formal untuk memberikan suatu kerangka kerja yang konsisten dan dapat direalisasikan untuk mencapai tujuannya, dan telah disahkan oleh para Komisaris Nasional pada Mei 2002.

75. Rencana tersebut memberikan peluang bagi suatu tim multidisipliner yang terdiri atas orang-orang Timor-Leste dan berkebangsaan asing di kantor nasional dan dalam tim distrik untuk menjaga arah yang jelas sepanjang periode operasional. Rencana tersebut diawali dengan bagaimana institusi dapat berkembang dari suatu tim kecil di Kantor Nasional menjadi sebuah institusi beranggotakan 270 pegawai yang melaksanakan beragam program yang tersebar di 13 distrik. Rencana ini juga menyediakan kerangka kerja untuk mengurangi skala operasi institusi dari skala puncak ke sebuah tim kecil yang perhatian utamanya adalah penyelesaian Laporan Akhir dan kemudian menutup Komisi. Rencana strategis ini menjadi acuan bagi para Komisaris dan stafnya sejalan dengan penambahan atau modifikasi program, dan turut membangun kepercayaan para donatur dan pemangku kepentingan lain bahwa Komisi memiliki rencana yang jelas dalam pemenuhan mandatnya.

76. Rencana tersebut membuat garis besar pendekatan terpadu terhadap kerja lapangan Komisi dalam tiga wilayah program inti, yaitu pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, dan dukungan korban. Rencana ini membagi kerja Komisi ke dalam 13 periode. Dalam setiap periode tersebut kegiatan dilakukan berdasarkan jadwal waktu yang ketat. Implikasi dan indikator administratif dan logistik dari tujuan-tujuan yang tercapai juga dijabarkan. Faktor-faktor sejarah, budaya, politik, dan logistik setempat dipertimbangkan dalam menyusun waktu dan sifat kegiatan yang akan dijalankan di setiap subdistrik.

77. Tim distrik secara umum melaksanakan program kerja yang sama di ke-65 subdistrik, memusatkan sumberdayanya pada satu subdistrik selama tiga bulan, sebelum melanjutkan ke subdistrik berikutnya. Selama enam minggu pertamanya di sebuah subdistrik, tim distrik mengadakan pertemuan dan konsultasi. Periode intensif kerjasama ini turut memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antara para pemimpin setempat dan perwakilan Komisi. Perekrutan tim distrik dari daerah setempat menunjukkan komitmen Komisi pada pendekatan kerja sama

dengan masyarakat setempat. Hal ini memberikan pemahaman lebih mendalam akan kondisi setempat, dan memungkinkan komunikasi langsung dengan bahasa dan dialek setempat. Berbagai kegiatan pencarian kebenaran, prosedur rekonsiliasi komunitas, dan dukungan korban diselenggarakan secara terpisah dan dijalankan oleh tim-tim yang berbeda, tetapi hanya satu program pendidikan diperlukan di setiap subdistrik, dan dukungan logistik digunakan bersama.

78. Kerja terpadu di subdistrik mengikuti serangkaian langkah standar. Para Komisaris regional dan tim distrik memulai kerja mereka dengan mengadakan pertemuan publik untuk menjelaskan mandat Komisi dan inti program kerjanya. Para anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan kekhawatiran mereka. Tim distrik sering melaksanakan berbagai diskusi dan pertemuan secara informal. Masyarakat diminta untuk memberikan ulasan mengenai masa-masa penting dan berbagai insiden kekerasan selama 25 tahun periode mandat. Tim distrik mengidentifikasi komunitas yang mungkin memiliki permintaan tinggi akan pencarian kebenaran, pengambilan pernyataan, dan kerja rekonsiliasi komunitas.

79. Staf dukungan korban dan penjangkauan memfasilitasi berbagai diskusi kelompok mengenai dampak pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan pertemuan lanjutan dengan para individu yang tertarik untuk memberikan pernyataan mengenai berbagai pelanggaran hak asasi manusia atau berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi komunitas. Para pengambil pernyataan pencarian kebenaran akan mulai mengambil pernyataan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Ketika para korban dengan kebutuhan mendesak teridentifikasi selama wawancara, mereka dialihkan ke staf dukungan korban untuk ditindaklanjuti. Staf rekonsiliasi juga mengambil pernyataan dari orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam prosedur rekonsiliasi komunitas. Mereka mengatur berbagai audiensi untuk kasus-kasus yang telah disetujui oleh Kejaksaan Agung.

80. Kegiatan terakhir dari program subdistrik tiga bulan adalah Audiensi Korban yang diatur oleh para Komisaris Regional dan tim distrik, serta dihadiri oleh seorang Komisaris Nasional, wakil pemerintah setempat, para pemuka adat dan gereja, serta anggota kepolisian. Setelah audiensi tersebut Komisaris Regional memberitahukan kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan di subdistrik selama periode tiga bulan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa informasi yang telah dikumpulkan di subdistrik akan disimpan dengan aman di arsip CAVR dan akan digunakan dalam Laporan Akhir Komisi. Oleh karenanya, audiensi subdistrik merupakan cara yang secara bersamaan menutup kerja Komisi di daerah tersebut, memberi penghargaan atas dukungan dan sumbangan masyarakat selama periode tiga bulan tersebut, dan berbagi pengalaman mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di daerah tersebut.

Program-program inti

Pencarian kebenaran

81. Tujuan program pencarian kebenaran adalah untuk mendokumentasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik politik antara April 1974 dan Oktober 1999. Strategi yang dirancang adalah pengambilan pernyataan secara sistematis di seluruh subdistrik, penelitian terfokus, dan penyelenggaraan audiensi publik. Submisi-submisi, termasuk berbagai dokumen dan materi lain yang relevan, juga diupayakan untuk didapat dari berbagai sumber di dalam Timor-Leste maupun di luar negeri.

Pengambilan pernyataan dan pengolahan data

82. Komisi mengumpulkan 7.824 pernyataan dari 13 distrik dan 65 subdistrik di Timor-Leste.* Bersama dengan sebuah koalisi LSM lokal di Timor Barat, Komisi bekerja untuk memberi kesempatan bagi warga asal Timor-Leste di Timor Barat untuk memberi pernyataan. Antara Februari dan Agustus 2003, koalisi LSM ini berhasil mengumpulkan 91 pernyataan dari orang-orang asal Timor-Leste yang tinggal di daerah-daerah kota Belu, Kefamenanu, Soe, dan Kupang di Timor Barat.

83. Para pengambil pernyataan di distrik mewawancarai para pemberi pernyataan atau deponen secara perorangan, walaupun anggota keluarga, teman, atau anggota tim dukungan korban dapat juga hadir. Para deponen biasanya adalah korban pelanggaran, walaupun mereka sering juga memberi informasi mengenai pelanggaran terhadap anggota keluarga atau kenalannya, yang banyak di antaranya telah meninggal atau hilang. Para pelaku juga ada yang memberi pernyataan, walaupun tentunya jumlah pernyataan dari mereka jauh lebih sedikit daripada jumlah pernyataan dari korban.

84. Para deponen memberi pernyataan mereka dalam bentuk narasi. Dengan demikian mereka dapat menceritakan kisahnya dalam kata-kata mereka sendiri, dan tidak dipandu oleh serangkaian pertanyaan. Metode ini dipilih karena dapat mendorong para deponen untuk memberi banyak perincian dan informasi mengenai pelanggaran dan keadaan yang meliputi kejadian tersebut. Prosedur ini juga cenderung tidak bersifat mengintimidasi bagi mereka yang tidak biasa menghadapi pertanyaan-pertanyaan dalam situasi resmi.

* Walaupun Rencana Pembangunan Nasional Timor-Leste menyebut 67 subdistrik di negara ini, ketika CAVR dibentuk, sebelum kemerdekaan, terdapat 65 subdistrik yang sudah umum disepakati, yang membentuk dasar strategi operasional Komisi. Tim Pengambilan Pernyataan Komisi mengumpulkan 7.824 pernyataan, meskipun beberapa dari pernyataan tersebut (155 pernyataan) tidak dimasukkan ke dalam *database* Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Human Rights Violation Database, HRVD) untuk analisa kuantitatif karena pernyataan-pernyataan tersebut tidak menyebutkan pelanggaran yang berhubungan dengan mandat Komisi atau pelanggaran yang mereka sebut tidak termasuk dalam periode referensi Komisi: Sebanyak 7.669 pernyataan telah terdaftar dalam HRVD Komisi.

85. Semua pernyataan yang dicatat dikumpulkan di kantor nasional, untuk selanjutnya diperiksa dan diberi kode oleh para pembaca pernyataan, dan dimasukkan ke dalam *database*. Pada proses pencantuman kode, para juru kode membaca dan mengidentifikasi pelanggaran hak asasi dalam setiap pernyataan. Adalah cukup umum bahwa dalam sebuah pernyataan terdapat lebih daripada satu kejadian pelanggaran, atau beberapa pelanggaran dalam satu kejadian. Para pencantun kode akan mengidentifikasi setiap pelanggaran, beserta informasi penting seperti identitas para korban dan pelaku jika diketahui, afiliasi institusi dari pelaku, serta tanggal dan tempat kejadian tersebut.

86. Perincian setiap pelanggaran di dalam pernyataan lalu dimasukkan ke dalam *database* elektronik, yang telah dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan analisa data tersebut. Sebagai contoh, setelah pemasukan seluruh pelanggaran yang teridentifikasi oleh tim pengkode, dapat dilakukan sebuah proses penelusuran untuk mengungkap jumlah keseluruhan dari suatu pelanggaran tertentu; berapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pelaku yang namanya disebut; jumlah serta proporsi pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dengan afiliasi kelompok tertentu; pengelompokan dan fluktuasi dalam pola-pola pelanggaran dalam kurun waktu tertentu dan di berbagai daerah. Sumber-sumber sekunder tepercaya yang lain, seperti kasus-kasus yang dilaporkan oleh Amnesty International antara 1979 dan 1999, diberi kode dan dimasukkan ke dalam *database*. Metodologi statistik yang digunakan dan langkah-langkah pengamanan yang diterapkan untuk memastikan keakuratan data diperinci pada bagian Lampiran dari Laporan ini.

87. Para juru kode pernyataan telah menerima pelatihan yang ekstensif mengenai dasar hukum berbagai pelanggaran hak asasi manusia tertentu yang harus mereka identifikasi. Di dalam pelatihan ini diterangkan mengenai unsur-unsur pelanggaran dan bagaimana menentukan apakah suatu keadaan tertentu memenuhi definisi yang ada. Sebagai contoh, para juru kode pernyataan dilatih untuk menentukan apakah suatu pelanggaran secara hukum memenuhi syarat sebagai penyiksaan ketimbang, misalnya, pelanggaran pidana penyerangan, atau perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan. Mereka juga dilatih untuk menentukan apakah suatu keadaan tertentu memenuhi syarat sebagai perkosaan atau perbudakan seksual.

88. Para juru kode diuji secara berkala untuk keakuratan dan konsistensi. Pada tes semacam ini, para juru kode diminta untuk membaca dan memberi kode pada sebuah kasus perumpamaan untuk melihat apakah mereka telah mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran secara akurat, dan memastikan bahwa sebagian besar anggota tim sepakat mengenai bagaimana sebaiknya mengidentifikasi berbagai pelanggaran. Kategori-kategori di dalam *database* diperingkat jenis pelanggaran-pelanggarannya pada awal proses untuk mencapai konsistensi yang lebih baik di antara para juru kode. Analisis statistik pernyataan-pernyataan tersebut memungkinkan Komisi untuk memenuhi tujuan-tujuan yang digariskan dalam Regulasi No. 10/2001 secara profesional dan objektif. Tujuan-tujuan ini di antaranya:

- Klarifikasi mengenai “latar belakang, situasi yang mendasari, faktor, konteks, alasan, dan pandangan” yang memicu terjadinya pelanggaran skala besar [Bagian 13.1(a)(ii)]
- Menetapkan “sifat” dari pelanggaran hak asasi manusia (yakni jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan) [Bagian 13.1(a)(i)]
- Mengumpulkan dan membandingkan laporan-laporan pelanggaran dari waktu ke waktu dan dari seluruh distrik untuk menentukan luasnya pelanggaran hak asasi manusia (yakni jumlah pelanggaran yang terjadi) [Bagian 13.1(a)(i)]
- Mengumpulkan informasi mengenai pola-pola pelanggaran sehingga dapat menilai apakah terjadi “pola pelanggaran yang sistematis” [Bagian 13.1(a)(i)]
- Menetapkan profil statistik dari “orang-orang, aparat, institusi, dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia” [Bagian 13.1(a)(iii)]
- Mengumpulkan dan membandingkan data mengenai pola pelanggaran dan pelaku yang terlibat untuk memberi bukti mengenai apakah “pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh perencanaan yang disengaja, kebijakan,” atau atas perintah dari pihak-pihak tertentu dalam konflik [Bagian 13.1(a)(iv)].

Penelitian

89. Program pengambilan pernyataan memungkinkan siapa saja yang mau untuk datang ke Komisi dan melaporkan informasi yang berkenaan dengan konflik politik. Harapannya adalah bahwa dengan membuka jaring informasi yang demikian luas ke distrik-distrik, akan terungkap amat banyak informasi mengenai semua aspek dari 25 tahun konflik. Selanjutnya, hasil analisis akan menyingkap gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi. Pendekatan yang luas dan tidak mengkhususkan pada sasaran tertentu ini berarti bahwa informasi akan didapat mengenai semua aspek konflik politik tersebut, termasuk kejadian-kejadian dan situasi yang sebelumnya belum pernah diketahui luas.

90. Komisi juga mengidentifikasi sepuluh tema utama yang punya makna khusus selama mandat sebagai topik untuk penelitian yang terperinci. Tema-tema ini adalah:

- Kelaparan dan pemindahan paksa
- Struktur, kebijakan, dan praktik pihak militer dan polisi Indonesia
- Struktur, kebijakan, dan praktik pihak Fretilin dan Falintil
- Penahanan dan penyiksaan
- Pembunuhan dan penghilangan paksa
- Anak-anak
- Perempuan
- Konflik politik internal 1974 - 1976
- Peran aktor-aktor internasional dalam proses penentuan nasib sendiri
- Pembantaian.

91. Unit penelitian melakukan lebih daripada 1.000 wawancara yang berfokus pada tema-tema tersebut di atas. Para subjeknya termasuk orang-orang yang telah memainkan peran penting pada berbagai tahapan konflik, serta pelaku dan korban. Para Komisaris dan staf melakukan wawancara ini di Dili, di distrik-distrik, di Portugal, dan di Indonesia. Tema-tema penelitian secara umum bersesuaian dengan tema-tema pada audiensi publik nasional, dan para peneliti juga telah memainkan peran yang penting dalam mengidentifikasi dan berhubungan dengan para korban dan saksi untuk berbicara pada audiensi-audiensi ini. Pada pertengahan 2003, Komisi memulai rangkaian wawancara dengan para tokoh nasional, yang dikenal dengan sebagai wawancara-wawancara VIP. Sebagai tambahan dari kesaksian tentang pengalaman pribadi, wawancara-wawancara ini memudahkan Komisi untuk menginvestigasi latar belakang dan perincian organisasi dan kejadian-kejadian. Komisi melaksanakan 15 wawancara VIP, baik di Timor-Leste maupun Indonesia, termasuk Timor Barat (lihat Lampiran Laporan ini).

92. Sejumlah besar dokumentasi primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema-tema penelitian ini juga telah dikumpulkan. Informasi mengenai konflik telah dikekang selama masa pendudukan militer, sehingga banyak individu menyembunyikan atau menyimpan dokumen-dokumen atau menyelundupkannya ke luar negeri. Komisi telah mengeluarkan permintaan umum untuk mendapatkan segala informasi yang berkenaan dengan mandatnya. Hal ini berhasil mendatangkan berbagai dokumen, rekaman video maupun audio, foto-foto, dan rekaman film kepada Komisi. Materi-materi ini digunakan dalam penulisan Laporan Akhir dan akan menjadi bagian dari arsip permanen.

Audiensi publik

93. Audiensi publik menjadi ciri utama dari program Komisi. Audiensi-audiensi ini turut memenuhi berbagai aspek dari mandat Komisi, termasuk pencarian kebenaran, memajukan rekonsiliasi, dan memulihkan martabat korban. Komisi menyelenggarakan audiensi publik dengan melibatkan peserta dari tingkat akar-rumput sampai tingkat kepemimpinan nasional dan juga para saksi dan ahli internasional. Para saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia memberi kesaksian tentang pengalaman mereka pada audiensi tingkat subdistrik, audiensi nasional, dan audiensi rekonsiliasi komunitas tingkat desa.

Audiensi korban

94. Sebuah audiensi korban diselenggarakan sebagai kegiatan akhir pada setiap program subdistrik, sesuai dengan rencana strategis. Para korban pelanggaran hak asasi manusia diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka, dalam kata-kata dan bahasa mereka sendiri, pada sebuah forum publik. Hal ini membantu memberitahu para anggota komunitas mereka yang lebih luas mengenai penderitaan yang telah mereka alami. Audiensi semacam ini juga membantu memulihkan sebagian martabat mereka yang hilang, dengan mendorong pengakuan atas

perjuangan dan kontribusi mereka. Audiensi korban juga memberi kesempatan bagi semua anggota komunitas untuk mendengar mengenai kejadian-kejadian semasa konflik yang sebelumnya tidak diketahui khalayak ramai. Hal ini membantu memupuk rasa solidaritas antara korban dan komunitasnya. Ini juga turut membantu mengklarifikasi sejarah lokal mengenai konflik, dan memperkuat tekad bahwa kejadian-kejadian menyakitkan di masa lalu tidak boleh terulang lagi.

Audiensi publik nasional

95. Komisi menyelenggarakan delapan audiensi publik nasional. Audiensi-audiensi ini disiarkan melalui televisi di Dili dan melalui radio secara nasional, serta diliput luas oleh pers lokal. Perwakilan dari media mancanegara turut hadir pada beberapa audiensi yang diselenggarakan.

96. Nilai dari audiensi-audiensi tematis ini terletak pada penyajian pandangan berbagai saksi dan ahli kepada seluruh penduduk. Kedelapan audiensi nasional tersebut dipimpin oleh tujuh Komisararis Nasional. Walau pencarian kebenaran merupakan salah satu tujuannya, juga diakui bahwa program tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang akan membantu rekonsiliasi nasional dan penghargaan kepada hak-hak para korban.

97. Para Komisararis menanyakan para saksi sesuai kesaksian mereka, tapi waktu yang tersedia untuk klarifikasi dengan cara ini cukup terbatas sehingga tidak ada penentuan atau temuan yang dibuat pada akhir dari audiensi-audiensi ini. Komisi mengakui bahwa pengambilan pernyataan dan wawancara yang mendalam merupakan cara yang lebih dapat diandalkan untuk mengumpulkan informasi, ketimbang audiensi publik. Namun, audiensi-audiensi ini sering menambah informasi penting kepada data yang dimiliki Komisi.

98. Audiensi publik memberi kesempatan yang langka bagi kalangan umum untuk mengetahui tentang aspek-aspek penting dari konflik politik. Audiensi-audiensi ini juga memberi kesempatan kepada para saksi untuk mengungkapkan pandangan mereka dan menceritakan pengalaman mereka dalam forum yang resmi. Komisi sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang terkait berbagai isu dan pihak dalam konflik diketengahkan dengan seimbang. Pemilihan para saksi dilakukan dengan prinsip keseimbangan, dengan mengumpulkan kesaksian dari laki-laki maupun perempuan, dari berbagai distrik di Timor-Leste, mengenai periode-periode konflik yang berbeda dan yang berkaitan dengan kelompok pelaku yang berbeda.

99. Audiensi-audiensi memberi kesempatan pertama kepada para korban kekerasan oleh pasukan keamanan Indonesia untuk berbicara secara terbuka mengenai kejadian-kejadian ini tanpa rasa takut akan balas dendam. Sejalan dengan tujuan memberi gambaran yang seimbang, jumlah terbesar para saksi dan korban memberi kesaksian mengenai kekerasan yang dilakukan oleh para anggota pasukan pendudukan Indonesia. Pengambilan pernyataan dan program penelitian telah menunjukkan bahwa para pelaku yang terkait dengan pasukan

pendudukan Indonesia telah melakukan sebagian besar pelanggaran selama periode mandat.

100. Para korban diberi kesempatan untuk berbicara dengan terbuka mengenai pengalaman mereka, termasuk menelaah hal-hal yang menyakitkan, “luka-luka lama” yang sebelumnya tertutup. Komisi berkeyakinan bahwa meskipun membuka luka-luka lama membawa risiko tertentu, namun mengungkapkan kebenaran di hadapan publik sangatlah penting. Menyingkap kejadian-kejadian yang telah lama buram, sehingga mendorong debat nasional, akan membantu menyelesaikan perselisihan yang ada dan amarah yang masih terpendam. Audiensi-audiensi ini menjadi pengalaman yang sangat emosional bagi mereka yang memberi kesaksian dan bagi khalayak ramai yang menyaksikan dan mendengarkan cerita mereka.

101. Audiensi publik nasional pertama diadakan pada 11-12 November 2002, bertepatan dengan peringatan pembantaian Santa Cruz 1991. Audiensi ini dikenal sebagai Audiensi Korban, dan diberi tajuk “Dengarkanlah Suara Kami” (*Rona Ami Nia Lian*). Tidak seperti audiensi-audiensi nasional berikutnya, audiensi ini tidak berfokus pada suatu tema atau jenis pelanggaran khusus, tapi lebih pada mengumpulkan para korban dari semua distrik di Timor-Leste yang memberi kesaksian tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama 25 tahun periode mandat. Ketujuh audiensi nasional yang menyusul kemudian diselenggarakan sesuai tema-tema tertentu.

102. Audiensi publik nasional bertema diadakan menurut jadwal berikut ini:

- 17 - 18 Februari 2003 – Pemenjaraan, Penahanan, dan Penyiksaan Politik
- 28 - 29 April 2003 – Perempuan dan Konflik
- 15 - 18 Maret 2004 – Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional
- 28 - 29 Juli 2003 – Kelaparan dan Pemindahan Paksa
- 19 - 21 November 2003 – Pembantaian massal
- 15 - 18 Desember 2003 – Konflik Politik Internal 1974 - 1976
- 29 - 30 Maret 2004 – Anak-anak dan Konflik.

Penelitian angka kematian

103. Pada Juni 2003, Komisi memulai penyelidikan statistik mengenai jumlah orang Timor-Leste yang meninggal sebagai akibat langsung dari konflik, apakah sebagai akibat pencabutan hak-haknya, dalam pertempuran, terkena tembakan, atau sebagai korban pembunuhan tidak sah atau penghilangan paksa. Walaupun sebelumnya sudah pernah ada usaha untuk memperkirakan angka kematian dari penyebab-penyebab seperti ini, penelitian ini merupakan kesempatan pertama sebuah organisasi melakukan penelitian objektif mengenai angka kematian selama konflik.

104. Proyek ini dirancang dan dilaksanakan dalam kerjasama dengan Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) atau Kelompok Analisis Data Hak Asasi Manusia,

organisasi internasional yang mengkhususkan diri pada analisis statistik hak asasi manusia dan telah berpengalaman dalam bidang ini dengan beberapa komisi kebenaran sebelumnya.* Analisisnya didasarkan pada tiga set data independen:

- informasi yang terkandung dalam sekitar 8.000 pernyataan yang telah dikumpulkan, diberi kode, dan dimasukkan ke dalam *database* Komisi
- sebuah Sensus Kuburan yang didasarkan pada penghitungan batu nisan di 492 perkuburan di Timor-Leste
- sebuah Survei Tingkat Kematian Retrospektif (berlaku surut), yang dirancang oleh HRDAG. Kemudian dilakukan survei mendalam terhadap anggota keluarga 1.322 rumahtangga yang dipilih secara acak di 121 *aldeia* (dusun) dari seluruh wilayah negara. Survei ini menggunakan daftar pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan angka kematian, seperti tanggal, situasi, dan penyebab kematian anggota keluarga selama masa konflik.

105. Penerapan teknik statistik pada kelompok data yang berbeda ini, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya, berhasil mendapatkan perkiraan mengenai angka kematian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

106. Metodologi dan hasil-hasil proyek analisis statistik mengenai angka kematian ini, serta analisis statistik dari pelanggaran tidak fatal yang diselidiki oleh Komisi, terdapat pada Lampiran dari Laporan ini.

Submisi

107. Komisi menerima sejumlah submisi tertulis dari Timor-Leste dan individu-individu dan organisasi yang berbasis di luar negeri. Termasuk di antaranya dokumen-dokumen asli, laporan-laporan, dan analisis yang menerangkan kejadian-kejadian selama periode mandat, serta foto-foto dan rekaman film dari masa itu (lihat bagian berikutnya, 1.5.1.6).

108. Komisararis Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia memberi sebuah submisi yang sangat berarti kepada Komisi, dalam bentuk sebuah laporan konsultan mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste pada 1999. Penulis laporan ini, Profesor Geoffrey Robinson dari Universitas California, Los Angeles, memiliki akses terhadap materi-materi rahasia yang dimiliki oleh misi UNTAET dan UNMISSET (United Nations Mission of Support in East Timor, Misi Pendukung PBB di Timor-Leste) serta Unit Investigasi Kejahatan Berat. Laporan ini sebelumnya belum dibuka untuk umum oleh Kantor Komisararis Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) pada saat Komisi menyiapkan Laporannya. Salinannya disertakan dalam Lampiran dari Laporan ini.

.....
* HRDAG melaksanakan analisis statistik dengan komisi kebenaran lain seperti di Afrika Selatan, Guatemala, dan Peru. Lihat lebih lengkap di bagian Pertanggungjawaban di Lampiran dalam Laporan ini.

109. Daftar lengkap submisi yang pernah diterima oleh Komisi terdapat pada Lampiran dari Laporan ini.

Sumber-sumber informasi

110. Komisi mengeluarkan panggilan kepada semua orang dan organisasi yang memiliki dokumen-dokumen yang relevan agar meneruskan materi-materi tersebut ke CAVR. Kemudian dokumen-dokumen ini dapat dipertimbangkan dalam penyusunan cerita yang akurat mengenai apa yang telah terjadi. Sebagai akibatnya, Komisi menerima bahan-bahan dan submisi dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia yang sebelumnya pernah terlibat dalam gerakan solidaritas internasional untuk Timor-Leste, dari Portugal, Indonesia, Australia, wilayah Asia, Amerika Serikat, dan Eropa. Organisasi-organisasi internasional seperti Catholic Relief Services of the USA dan Australian Council for Overseas Aid (ACFOA), juga menyediakan materi berharga yang bersumber dari panjangnya keterlibatan mereka dengan Timor-Leste selama periode mandat.

111. Berbagai bahan juga dengan mudah diberikan oleh para korban dan saksi warga Timor-Leste, pemimpin nasional dan pemuka setempat, dan organisasi-organisasi non-pemerintah, khususnya Yayasan HAK dan Fokupers (Forum Komunikasi Perempuan Timor-Leste). Koleksi dari mendiang Profesor Herb Feith telah disumbangkan kepada arsip Komisi setelah ia meninggal pada 2003.

112. Sejumlah orang Indonesia memberi kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional dan menyediakan submisi tertulis. Anggota Komisi Nasional Perempuan Indonesia dan sekelompok LSM dari Timor Barat (Indonesia), Tim Kemanusiaan Timor Barat, membuat submisi pada Audiensi Publik CAVR tentang Perempuan dan Konflik. Lembaga hak asasi manusia Indonesia, Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), membuat dua submisi kepada CAVR: yang satu mengungkapkan penelitian terperinci terhadap struktur dan operasi militer Indonesia, dan yang lain adalah testimoni dari perwira militer Indonesia dan keluarga mereka, berjudul “Cerita dari Garis Belakang”. Selain itu sejarawan Indonesia Asvi Warman Adam dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyampaikan kesaksiannya dengan judul “Sejarah Timor-Leste dalam Indonesia Baru” dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional. Sejumlah pekerja dan aktivis HAM lainnya juga memberikan kesaksian pada audiensi tersebut dan kesaksian mereka telah digunakan dalam bab-bab yang relevan dalam Laporan ini.

113. Komisi tidak begitu berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai pemerintah, yang memberi tanggapan berbeda-beda kepada Komisi. Komisi pernah menulis kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang disebut dalam Laporan ini di bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri, untuk meminta dan mendengar pendapat mereka. Komisi mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Indonesia, Perdana Menteri Portugal dan Australia, Pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Republik Rakyat Cina, dan Kerajaan Inggris. Tidak ada jawaban

resmi yang diterima tetapi Komisi menerima bantuan dari beberapa perwakilan dari pemerintah tersebut yang berada di Timor-Leste. Komisi juga mencaritahu mengenai akses terhadap dokumentasi di Moskow dan Vatikan.

114. Komisi juga menulis kepada individu-individu dari pemerintahan terdahulu, termasuk Presiden Jimmy Carter dari Amerika Serikat, para mantan menteri dan pejabat pemerintah termasuk mantan Perdana Menteri Australia Gareth Evans dan mantan Duta Besar Richard Woolcott, serta sejumlah mantan pejabat Indonesia. Jawaban yang diterima sangat beragam dan beberapa bahan diterima sebagai hasil dari permintaan ini.

115. Selain menulis ke Presiden Megawati Sukarnoputri untuk mencari informasi, tetapi tidak ada tanggapan, Komisi juga mengundang beberapa mantan pemimpin dan pejabat Indonesia untuk memberi kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional: Mantan Presiden B.J. Habibie; Mochtar Kusumaatmaja, mantan Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Soeharto; Dewi Fortuna Anwar, penasihat luar negeri Presiden B.J. Habibie; Frans Seda, mantan menteri pada kabinet Soeharto; Francisco Lopes da Cruz, mantan Duta Besar Keliling Khusus Masalah Timor-Leste untuk Presiden Soeharto; Jusuf Wanandi, dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), tidak seorang pun yang bisa memberikan kesaksian, tetapi Jusuf Wanandi menyediakan sebuah kesaksian yang dibacakan atas nama dia.

116. Masalah umum yang dihadapi baik oleh beberapa pemerintah dan Komisi adalah hambatan dalam menemukan catatan-catatan yang telah berusia 30 tahun. Dalam sebagian besar kasus, suatu pencarian yang menyeluruh masih harus dilakukan, dan dalam kasus ketiadaan undang-undang kebebasan informasi atau bila akses sangat terbatas, pencarian itu mungkin tidak akan berhasil.

117. Namun, keputusan beberapa pemerintah untuk melepaskan beberapa catatan rahasia mereka tentang Timor-Leste telah banyak membantu Komisi untuk menggenapi tanggung jawabnya dalam menetapkan kebenaran. Dokumentasi yang dilepaskan oleh Pemerintah Australia untuk periode 1974 - 1976 dan dua volume tentang *Relatórios da Descolonização de Timor* pada 1974 - 1975 yang dibuat oleh Pemerintah Portugis, keduanya sangat bernilai. Komisi juga diuntungkan dengan dibukanya beberapa catatan rahasia oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan dari Perpustakaan Kepresidenan Ford dan Carter kepada National Security Archive, empat volume bahan yang tidak dirahasiakan lagi dari Pemerintah Selandia Baru; dan beberapa dokumen yang dilepas oleh Kerajaan Inggris yang disediakan kepada Komisi oleh Hugh Dowson. Komisi juga secara intensif berhasil menarik catatan tentang debat informatif dan beberapa audiensi tentang Timor-Leste yang dilaksanakan di PBB, di Kongres AS, dan koleksi Parlemen Australia tentang dokumen dasar masalah Timor yang diedit oleh Heiki Krieger dan dipublikasikan oleh Universitas Cambridge. Semua dokumen tersebut juga diperkaya dengan kesaksian secara tertulis dan lisan yang diberikan kepada Komisi oleh para mantan diplomat yang bekerja di PBB, Pemerintah AS, dan Australia.

Rekonsiliasi Komunitas

118. Semua aspek kerja Komisi dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu dengan tujuan untuk mendorong rekonsiliasi.

119. Pertikaian yang terus berlanjut mengenai fakta-fakta sejarah, serta pengingkaran terhadap fakta-fakta tersebut mencegah pihak-pihak yang terlibat konflik menemukan dasar yang sama untuk memulai proses rekonsiliasi yang menyakitkan, sulit, dan perlahan. Berbagai aktivitas pencarian kebenaran dimaksudkan untuk mengungkap sejarah berbagai peristiwa yang didasarkan pada informasi yang objektif, alih-alih pada kabar burung atau propaganda. Versi kebenaran yang memiliki dasar yang kuat seperti ini pada gilirannya dapat membuka jalan bagi pengakuan tanggung jawab, sehingga akan memungkinkan terjadinya penerimaan dan pemaafan.

120. Aspek dukungan korban dari kerja Komisi juga meletakkan fondasi bagi rekonsiliasi dengan maksud untuk mendefinisikan kembali hubungan di antara korban, pelaku, dan komunitasnya. Pengembalian martabat yang pernah direnggut dari para korban meredakan kemarahan yang terpendam dan memungkinkan para korban untuk beranjak kepada penerimaan dan pemaafan terhadap orang-orang yang telah merugikan atau menyakiti mereka.

121. Program utama yang mendukung mandat rekonsiliasi Komisi adalah Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK) seperti yang tercantum dalam Bagian IV dari regulasi. Tujuan program tersebut adalah untuk menawarkan sebuah penyelesaian hukum terhadap berbagai kejahatan “ringan” yang dilakukan selama konflik, membantu para pelaku kembali ke masyarakatnya, dan membangun kembali hubungan antara korban, pelaku, dan komunitasnya.

122. Belum pernah ada kegiatan serupa yang bisa dijadikan contoh untuk PRK, di Timor-Leste atau di tempat lain. Prosedur Rekonsiliasi Komunitas banyak mengambil praktik peradilan tradisional selain juga prinsip-prinsip arbitrase dan mediasi, serta aspek-aspek hukum pidana dan perdata sebagai acuannya. Berbagai pandangan yang diungkapkan selama konsultasi komunitas yang dilaksanakan oleh Komite Pengarah sangat memengaruhi rancangan program. Ini terlihat dalam keputusan untuk memasukkan unsur-unsur seperti praktik-praktik spiritual setempat, pengakuan dan pemaafan, dan partisipasi para pemimpin setempat. Para korban juga diberi kesempatan untuk berhadapan dan berbicara langsung dengan para pelaku, sementara para pelaku diwajibkan untuk mengakui dan meminta maaf kepada korban dan komunitasnya. Akhirnya rancangan tersebut menjalin hubungan langsung yang resmi dengan Kejaksaan Agung dan Pengadilan-pengadilan Distrik di Timor-Leste.

123. Regulasi menyebutkan bahwa para pelaku kejahatan “ringan” dan “tindakan yang merugikan” berkaitan dengan konflik politik diizinkan datang ke Komisi dan memberikan pernyataan yang menjelaskan secara lengkap kejadian seputar tindakan mereka. Tindakan-tindakan seperti pembakaran rumah, penjarahan, dan pemukulan adalah jenis kasus yang layak ditangani oleh PRK, namun ‘kejahatan

berat' seperti pembunuhan, perkosaan, dan penyiksaan tidak termasuk. Setelah membantu deponen melengkapi pernyataannya, Komisi meneruskannya kepada Kejaksaan Agung, yang akan memutuskan apakah kasus itu dapat dilanjutkan melalui PRK dan tidak melalui penuntutan.

124. Sebuah panel yang terdiri atas tiga sampai lima pemimpin setempat diketuai oleh Komisariss Regional kemudian dipilih untuk memimpin audiensi di komunitas deponen. Formatnya cukup fleksibel untuk memberi ruang bagi praktik-praktik spiritual dan praktik adat lainnya yang khas bagi komunitas tersebut. Pelaku diminta mengakui kesalahannya di muka umum dan para korban dapat secara langsung bertanya dan memberitahu pelaku dampak yang dialaminya akibat tindakan mereka. Anggota komunitas dapat mengajukan pertanyaan mengenai pernyataan pelaku dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Tanya-jawab ini sering memanas, tapi tidak pernah menimbulkan kekerasan. Audiensi-audiensi ini merupakan kegiatan komunitas yang sangat khusus, dan biasanya berlangsung dari pagi hingga larut malam. Beberapa audiensi yang melibatkan banyak pelaku berlangsung selama beberapa hari.

125. Ketika semua masalah yang relevan telah ditelusuri, panel kemudian memperantarai kesepakatan melalui konsultasi dengan para korban dan pelaku. Si pelaku harus melakukan 'aksi rekonsiliasi' tertentu agar dirinya dapat diterima kembali ke dalam komunitasnya. Aksi-aksi ini dapat berupa kerja bakti dan pemberian uang, ternak, atau benda-benda lain kepada korban. Persetujuannya didaftarkan kepada Pengadilan Distrik yang berwenang, dan setelah memenuhi semua tindakan yang disyaratkan, pelaku mendapat kekebalan dari tuntutan pidana dan perdata di masa mendatang untuk pelanggaran-pelanggaran yang diakuinya.

126. Program PRK dimulai secara perlahan, sebagian karena ketidakjelasan di tingkat lokal mengenai sifat dari proses tersebut. Ketika berita mengenai audiensi yang pertama menyebar, permintaan meningkat. Pada akhirnya, 1.379 pelaku berhasil menyelesaikan audiensi PRK, jauh di atas target awalnya yaitu 1.000. Karena semua kasus di suatu desa biasanya didengar pada saat yang sama, jumlah audiensi yang sebenarnya adalah 216. Diperkirakan 40.000 anggota komunitas hadir dan berpartisipasi dalam berbagai audiensi.

127. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi menunjukkan bahwa program PRK membuat sebuah kontribusi penting ke arah rekonsiliasi. Para pelaku, korban, dan peserta lainnya menyatakan bahwa audiensi telah memberikan kesempatan bagi seluruh komunitas untuk menelusuri dan mengklarifikasi berbagai kejadian lokal yang terkait konflik politik dan pengaruhnya pada penduduk. PRK membantu para pelaku agar diterima kembali. Hal ini memungkinkan mereka untuk mulai bekerja lagi dan berinteraksi dengan tetangga alih-alih bersembunyi, dalam ketakutan dan antisipasi terhadap ancaman dan kemungkinan kekerasan.

128. Para korban yang menanggapi survei mengatakan bahwa PRK telah membantu meredakan kemarahan mereka dengan memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkan secara langsung kepada pelaku yang pernah merugikan mereka.

Hal ini membuat mereka mampu berbesar hati dan memaafkan, dengan syarat adanya ungkapan rasa bersalah dan penyesalan yang sungguh-sungguh oleh pelaku. Dengan memberikan solusi kepada setiap kasus yang berpotensi menyebabkan kekerasan dan balas dendam di daerah tempat tinggal mereka, PRK memberi sumbangan penting dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas pada saat kedua pihak sedang dalam keadaan paling rentan. Bagian 9: Rekonsiliasi komunitas dari Laporan ini memberikan gambaran dan analisis yang lebih lengkap mengenai Prosedur Rekonsiliasi Komunitas.

129. Program radio mingguan Komisi menyiarkan liputan sejumlah besar audiensi rekonsiliasi komunitas, dan juga diskusi mengenai isu-isu yang muncul dari audiensi nasional dan masalah lain terkait dengan rekonsiliasi.

Penerimaan dan dukungan korban

130. Divisi Penerimaan (*Acolhimento*) dan Dukungan Korban berpegang pada prinsip bahwa para korban pelanggaran hak asasi manusia harus menjadi perhatian utama kerja Komisi. Divisi ini berupaya mengembangkan dan melaksanakan cara-cara praktis untuk mendukung para korban dan meningkatkan pengakuan dan penghormatan terhadap mereka.

131. Komisi menerapkan program-program dukungan korban baik yang bersifat publik maupun pribadi. Audiensi publik dan program informasi membantu memperbaiki hubungan dan mendorong saling pengertian antara korban dan komunitasnya dengan memberi kesempatan bagi korban untuk menceritakan pengalaman mereka. Lokakarya pemulihan lebih bersifat pribadi, memusatkan perhatian pada kebutuhan pribadi para korban dengan bekerja bersama kelompok orang yang pernah mengalami trauma yang serupa.

132. Staf Penerimaan dan Dukungan Korban melakukan berbagai kegiatan berikut:

- Memonitor kesejahteraan pengungsi yang baru kembali ke Timor-Leste. Kegiatan ini mencakup identifikasi dan tindak lanjut terhadap kasus-kasus, melalui pemecahan masalah bekerjasama dengan organisasi urusan pengungsi, seperti UNHCR
- Menyelenggarakan pertemuan publik untuk memberitahu masyarakat mengenai kerja Komisi dan untuk memperoleh berbagai tanggapan dan rekomendasi
- Mendukung para korban pelanggaran HAM yang berpartisipasi dalam program Komisi baik dengan memberikan pernyataan, kesaksian dalam audiensi publik, menghadiri proses rekonsiliasi komunitas, atau berpartisipasi dalam lokakarya pemulihan
- Memfasilitasi berbagai diskusi kelompok dan mencatat sejarah lokal dengan memusatkan perhatian pada dampak pelanggaran HAM di setiap komunitas

- Membantu para korban dengan kebutuhan mendesak dengan menilai kasus-kasus mereka, merujuk mereka kepada organisasi yang tepat, dan memberikan bantuan keuangan sekadarnya, sebagai bagian dari rencana Reparasi Darurat Komisi

133. Bagian 10: *Acolhimento* dan dukungan korban dari Laporan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kerja Divisi ini.

Laporan akhir

134. Bagian 13.1(c) dari Regulasi menetapkan untuk “menyiapkan sebuah laporan lengkap yang menggambarkan kegiatan dan temuan, berdasarkan informasi yang faktual dan objektif dan bukti yang dikumpulkan atau diterima atau diberikan pada Komisi”. Bagian 21 secara spesifik memerinci tugas-tugas Komisi dalam pemenuhan fungsi ini. Sub-bagian 21.1 menyatakan bahwa Komisi “harus menyusun dan menyerahkan kepada Presiden suatu laporan akhir yang didasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan oleh Komisi.” Sub-bagian 21.2 menyatakan bahwa Komisi harus “merangkum berbagai temuan Komisi dan membuat rekomendasi berkaitan perubahan hukum, politik, administratif, atau lainnya yang harus diambil untuk mencapai tujuan Komisi untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan menanggapi kebutuhan korban pelanggaran hak asasi manusia.” Sub-bagian 21.3 menyatakan bahwa laporan yang dibuat oleh Komisi harus segera tersedia kepada umum dan diterbitkan dalam Lembaran Negara, dan sub-bagian 21.4 menyatakan bahwa Presiden “mempertimbangkan semua rekomendasi yang diajukan oleh Komisi dalam laporan akhir dengan tujuan menjalankannya.”

135. Persiapan dan diseminasi laporan akhir yang menyeluruh merupakan tujuan inti dari mandat Komisi. Perencanaan untuk hal ini dimulai segera setelah retreat Komisararis Nasional pertama di Maubara pada Januari 2002. Pada retreat berikutnya di Dare pada Mei 2003, struktur Laporan Akhir dibahas dan persetujuan sementara diberikan.

136. Penyelesaian Laporan Akhir merupakan tugas yang sangat sulit bagi semua yang terlibat. Tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu berdampak berat bagi banyak kontributor Laporan ini. Kerja yang telah selesai merupakan penghargaan yang kekal atas dedikasi dan komitmen mereka.

137. Mandat Komisi sangatlah luas, termasuk beragam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode 25 tahun 6 bulan, dimulai dari 25 April 1974 sampai 25 Oktober 1999 seperti tercantum dalam Regulasi nomor 10/2001. Proses penulisan melibatkan sebuah upaya kerjasama antardivisi. Tim-tim peneliti menghasilkan rangkuman tematis berdasarkan wawancara dan sumber-sumber sekunder. Kekayaan informasi di *database* pelanggaran HAM menghasilkan informasi untuk menentukan pola-pola, untuk mengidentifikasi sejumlah pelanggaran yang dilaporkan yang melibatkan pelaku tertentu, untuk menentukan afiliasi institusi pelaku, dan untuk menyediakan profil korban. Hal ini memberikan cara praktis bagi para penulis untuk mengidentifikasi dan mengakses pernyataan-

pernyataan asli yang berhubungan dengan subjek-subjek yang ditulisnya. Survei angka kematian menghasilkan informasi mengenai tingkat dan penyebab kematian yang terjadi selama periode mandat.

138. Kerumitan menghasilkan Laporan dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Portugis, dengan versi populer dalam bahasa Tetum, sangat akut. Kerumitan ini akibat kebijakan Komisi untuk menghasilkan Laporan Akhir dalam bahasa-bahasa tersebut. Karena tim penulis dan editor bekerja dalam bahasa Inggris dan Indonesia, perlu untuk selalu menyediakan salinan rancangan bagian-bagian dan bab-bab terkini dalam kedua bahasa tersebut. Setiap tim penulis, yang biasanya terdiri atas dua anggota orang Timor-Leste dan seorang anggota staf internasional, diberi tanggung jawab untuk membuat rancangan bagian dan bab-bab. Rancangan-rancangan ini kemudian diterjemahkan dan diserahkan kepada tim penyunting (editorial). Versi yang telah disunting kemudian diterjemahkan lagi dan diserahkan kepada Komisaris Nasional untuk dipertimbangkan. Bagian-bagian dan bab-bab ini dibahas, perbedaan substantif-politis diperdebatkan, dan berbagai perubahan direkomendasikan (lihat di atas, 1.4.2, Tantangan bahasa, paragraf 64 - 64).

139. Tim editorial kemudian bertanggung jawab untuk membuat berbagai perubahan yang direkomendasikan. Sebuah kelompok kerja yang lebih kecil, yang terdiri atas Komisaris dan staf, mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis, misalnya apakah istilah-istilah yang diterjemahkan telah secara akurat sesuai dengan naskah yang telah disetujui. Mereka juga memecahkan ketidakkonsistenan di dalam atau di antara bagian-bagian Laporan. Tim pengecek fakta bertanggung jawab mengecek bahwa semua perincian yang ada dalam draf sudah akurat, berdasarkan berbagai pernyataan dan bahan-bahan yang ada. Selanjutnya dilakukan sebuah proses penyuntingan teknis, saat naskah diperiksa konsistensinya dengan gaya bahasa yang telah ditetapkan dan referensi silang dimasukkan.

140. Regulasi mensyaratkan semua keputusan Komisi harus diambil berdasarkan konsensus atau, bilamana konsensus tidak dapat dicapai, dengan persetujuan mayoritas dari ketujuh Komisaris. Mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang bersifat sensitif antara tujuh individu merupakan tugas yang tidak sederhana. Meminta konsensus mengenai penggunaan istilah-istilah tertentu dapat menjadi kendala bagi kemajuan Laporan, khususnya bila ada kata atau istilah suatu bahasa yang dapat secara akurat mencerminkan kehendak dari Komisi tidak memiliki padanan yang tepat ketika diterjemahkan ke dalam salah satu dari dua bahasa lainnya dalam penerbitan Laporan.

141. Komisi mempertimbangkan bahwa Komisi dimandatkan untuk menyampaikan Laporan Akhirnya dalam salah satu bahasa resmi negara ini. Karena keterbatasan yang dimiliki dalam bahasa Tetum, maka dipilihlah bahasa Portugis. Penerjemahan Laporan Akhir ke bahasa Portugis menuntut lebih banyak waktu dan proses *review* serta verifikasi oleh para Komisaris Nasional. Pemerintah Portugis memberikan bantuan dengan menyediakan seorang ahli bahasa Portugis, Paula Pinto, untuk menjamin terpenuhinya standar terjemahan. Komisi berharap bahwa Laporan Akhir ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Tetum, ketika sumberdaya dan kapasitas teknik tersedia.

142. Sebagai tambahan pada versi resmi Laporan Akhir yang lengkap, Komisi telah membuat versi-versi laporan yang dapat lebih luas diakses. Sebuah versi film dokumenter berdurasi dua-setengah jam telah diproduksi dalam bahasa Tetum, dengan terjemahan dalam bahasa Inggris, Portugis, dan Indonesia, demikian juga versi radio bahasa Tetum, eksibisi fotografi, dan serial buklet mengenai tujuh audiensi publik tematis nasional dalam bahasa Tetum, Indonesia, dan Inggris. Sebuah eksibisi fotografi tentang para korban yang selamat dari pelanggaran dilaksanakan untuk menghormati harga diri dan aspirasi mereka, bersama penerbitan buku fotografi tentang *survivor* (korban yang selamat) yang mengekspresikan harapan untuk masa depan. Komisi percaya bahwa laporan dan bahan penelitian terkait di Arsip Comarca memberikan sumber bahan yang kaya yang dapat menjadi dasar untuk menghasilkan materi pengajaran mengenai HAM, rekonsiliasi, dan sejarah Timor-Leste yang mudah diakses.

143. Komisi membentuk sebuah tim kampanye Laporan Akhir, yang sejak pertengahan 2004 melaksanakan perjalanan ke seluruh distrik untuk membagi informasi tentang proses penulisan Laporan Akhir. Tim ini mempertontonkan video hasil kerja Komisi dan melaksanakan diskusi kelompok di seluruh distrik, sebagai pembuka jalan untuk diseminasi Laporan Akhir.

Arsip

144. Komisi diberi mandat untuk memelihara arsip-arsip dan catatan-catatannya untuk referensi masa depan dan memberi pertimbangan tentang apakah bahan-bahan tersebut akan tersedia secara terbuka bagi masyarakat Timor-Leste, menentukan aturan-aturan yang diperlukan untuk menyediakan perlindungan bagi informasi rahasia, dan aturan-aturan yang diperlukan untuk memberi rasa aman bagi orang-orang yang telah memberi kesaksiannya kepada Komisi (Regulasi UNTAET Bagian 43.2). Pada April 2004, ketika kantor nasional mengalami restrukturisasi, Divisi Arsip dan Comarca didirikan untuk mengamankan arsip-arsip dan perpustakaan Komisi. Divisi ini juga diberi tanggung jawab untuk merencanakan penggunaan Comarca di Balide sebagai pusat memorial untuk korban, hak asasi manusia, dan rekonsiliasi.

145. Tim Arsip dan Comarca terdiri atas empat anggota staf yang dibantu para pustakawan relawan, dengan seorang spesialis pengarsipan internasional sebagai penasihat. Karena di Timor-Leste tidak ada kader terlatih dalam bidang manajemen informasi yang berspesialisasi dalam menjalankan pengarsipan, prioritas pertama divisi ini adalah pembangunan kapasitas.

146. Arsip ini mencakup seluruh dokumentasi dari program pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, *acolhimento* dan dukungan korban, serta arsip administrasi yang berhubungan dengan keuangan, hukum, dan manajemen strategis. Terdapat lebih daripada 7.740 rekaman pernyataan dari proses pencarian kebenaran, lebih daripada 1.000 wawancara penelitian, lebih daripada 1.541 pernyataan rekonsiliasi komunitas, ratusan jam rekaman digital dan audio dari audiensi publik, dan ribuan

laporan penelitian dan materi-materi terkait. Koleksi foto dan rekaman video, serta arsip audio yang lengkap dari program radio mingguan Komisi juga disimpan dalam Arsip ini.

147. Sedangkan di perpustakaan terdapat lebih daripada 2.500 judul, terutama buku-buku dan artikel-artikel tentang Timor-Leste, Indonesia, studi hak asasi manusia, dan perdamaian, dalam bahasa Tetum, Portugis, Indonesia, Inggris, dan bahasa lainnya.

148. Arsip Comarca adalah anggota pendiri Asosiasi Perpustakaan dan Informasi Timor-Leste (ABITL), yang pertemuan perdananya diadakan di Comarca. Pemerintah telah setuju bahwa Arsip Komisi harus terus dipelihara di Comarca. Arsip CAVR memiliki hubungan erat dengan Arsip Nasional Timor-Leste yang dijalankan negara.

149. Direncanakan untuk mengadakan sebuah pameran permanen yang berkaitan dengan Laporan Akhir Komisi dan ini akan bertempat di Pusat Arsip dan Dokumentasi Comarca.

Kewajiban Komisi terhadap para peserta dalam program-program intinya

Kerahasiaan

150. Seluruh pernyataan perorangan dijaga kerahasiaannya. Setiap orang yang memberikan pernyataan diminta persetujuannya mengenai penggunaan bahan dari pernyataannya dalam Laporan Akhir Komisi. Mereka juga ditanyai apakah warga Timor-Leste dapat mengakses pernyataan mereka setelah periode mandat Komisi berakhir. Para saksi dapat memilih untuk memberikan informasi secara rahasia; secara anonim, dengan tidak mencantumkan identitas diri dan identitas orang-orang yang disebut dalam pernyataan mereka; atau sesuai pilihan lain yang mereka inginkan berkaitan dengan penggunaan pernyataan mereka. Pemberi pernyataan diberitahu bahwa akses staf Komisi terhadap informasi yang tercantum dalam pernyataan mereka akan dibatasi, dan bahwa Komisi akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dokumen. Regulasi mewajibkan seluruh Komisaris, staf, dan orang-orang yang bekerja atas nama Komisi untuk “memelihara dan menjaga” kerahasiaan dari semua materi yang rahasia. Mereka yang diketahui telah membocorkan informasi rahasia dan melanggar kewajiban-kewajiban yang diperinci dalam Regulasi, dapat dikenai sanksi pidana.⁴

Hak-hak para deponen dalam PRK

151. Adalah kebijakan Komisi untuk memastikan bahwa seluruh pendaftar Prosedur Rekonsiliasi Komunitas memahami implikasi dari tindakan mereka memberikan pernyataan. Karena itu, mereka diberitahu bahwa pernyataan tersebut akan diteruskan ke Kejaksaan Agung dan dapat digunakan dalam proses hukum di masa

depan. Jika memungkinkan, informasi ini akan diberikan kepada para deponen dalam bahasa setempat.

Perlindungan saksi

152. Semua langkah praktis telah diambil untuk menjamin keselamatan para saksi. Polisi hadir di setiap audiensi publik dan tindakan yang diperlukan telah diambil dalam keadaan di mana para saksi mungkin terancam. Para saksi diberitahu mengenai haknya untuk memberikan informasi secara rahasia. Bantuan polisi bisa diminta jika diperlukan, tetapi setiap saksi diberitahu mengenai keterbatasan praktis perlindungan seperti ini agar mereka dapat memutuskan apakah akan memberikan bukti secara terbuka atau tertulis atau tidak samasekali. Komisi juga memberitahukan kepada para saksi bahwa sesungguhnya CAVR tidak dapat memberikan mereka perlindungan secara fisik di rumah mereka.

Kantor Nasional dan Regional serta masalah kepegawaian

Kantor Nasional

153. Pada awal Komisi ini berdiri, Kantor Nasional di Dili sementara menempati gedung Balai Pelatihan Guru (BPG), bekas kompleks UNAMET yang bersejarah pada 1999 yang kemudian menjadi kantor pusat CNRT pada 2000. Pada masa itu berbagai pembicaraan telah dilakukan dengan Pemerintah Timor-Leste dan para donatur internasional untuk merehabilitasi bekas penjara Comarca di Balide untuk digunakan sebagai rumah bagi Komisi. Mengubah bekas penjara untuk tahanan politik ini menjadi kantor pusat Komisi memiliki makna simbolik yang jelas, serta memiliki fungsi praktis yakni memberi Komisi sebuah basis yang terkemuka dan mudah diakses umum.

Dari penjara menjadi pusat memorial untuk korban, Hak Asasi Manusia, dan Rekonsiliasi

Comarca di Balide, Dili, didirikan pada awal 1960-an oleh pemerintah kolonial Portugis dan kemudian terus digunakan sebagai penjara oleh pihak Indonesia antara Januari 1976 sampai 12 September 1999. Penjara itu rusak ketika terjadi kekerasan di Dili selama September 1999.

Ide untuk merehabilitasi Comarca diusulkan pertama kali oleh Asosiasi Eks-Tahanan Politik (Assepol) pada 2000 dan dijalankan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mendirikan Komisi. Komite Pengarah setuju bahwa jika bekas penjara ini dipelihara sebagai monumen bagi pengingkaran hak-hak asasi manusia dan simbol bagi kemungkinan transformasi, ini akan menjadi sumbangan positif bagi pemulihan. Ide ini menjadi mungkin pada Januari 2002 ketika Xanana Gusmão dalam kunjungannya ke Tokyo memperoleh dana hibah dari Perdana Menteri Jepang sebesar USD 1 juta untuk Komisi. Sekitar setengah dari dana hibah ini akan digunakan untuk pekerjaan infrastruktur, termasuk rehabilitasi Comarca.

Pada Maret 2002, Menteri Kehakiman, Ana Pessoa Pinto, bertemu dengan para Komisaris dan mengonfirmasikan alokasi Comarca untuk Komisi. Suatu Nota Kesepakatan ditandatangani pada April 2002 antara Komisi dan Assepol. Pernjanjian tersebut mengukuhkan bahwa nilai sejarah gedung ini akan dipelihara keasliannya dan Assepol akan dimintai pendapatnya selama rehabilitasi fisik berlangsung. Rencana bagi gedung ini mencakup penggunaannya sebagai kantor nasional Komisi. Gedung ini juga akan digunakan untuk menyimpan arsip berupa dokumen-dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste, yang dibuat sedemikian rupa agar mudah diakses untuk umum setelah berakhirnya mandat Komisi.

Rancang-bangun rehabilitasi penjara ini dimulai pada Juli 2002. Dokumentasi yang cermat mengenai penggunaan gedung penjara ini dilakukan untuk memelihara apa yang diketahui, termasuk tempat-tempat terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Enampuluh-lima coretan dinding yang dibuat oleh para tahanan Timor, sipir Indonesia, atau anggota milisi, dipelihara sebagaimana aslinya.

Setelah melalui proses tender terbuka, perusahaan yang dipilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi dipimpin oleh seorang mantan tahanan Comarca, Julio Alfaro. Rekonstruksi dimulai pada September 2002. Suatu tempat pertemuan tradisional yang besar dibangun di lahan bekas lapangan olahraga, untuk digunakan sebagai tempat audiensi publik nasional dan kegiatan Komisi yang lain. Kebun ditanami oleh Maria José Franco Pereira, seorang anggota polisi Timor-Leste yang melewati beberapa tahun di penjara ini. Ia ditahan bersama ibunya ketika baru berusia empat tahun pada 1976. Acara selamatan tradisional, melambangkan pengusiran arwah-arwah yang mengganggu yang berhubungan dengan sejarah penganiayaan yang terjadi di penjara, dilaksanakan pada saat kerja konstruksi selesai.

Kantor pusat nasional CAVR yang baru diresmikan dalam sebuah upacara yang dibuka oleh Presiden Kay Rala Xanana Gusmão, dan dihadiri oleh Uskup Basilio do Nascimento. Presiden Kay Rala Xanana Gusmão memberikan kata sambutan. Acara tersebut dilanjutkan dengan audiensi publik selama dua hari mengenai pemenjaraan politik di Timor-Leste. Di antara mereka yang memberi kesaksian adalah bekas tahanan di Comarca ini.

Selama mandat Komisi, Comarca telah menjadi tempat diselenggarakannya audiensi, lokakarya pemulihan, dan berbagai kegiatan lain. Nyanyian, tarian tradisional, teater, doa, dan aktivitas individual dan kelompok mendatangkan semangat pemulihan ke tempat yang pernah menjadi pusat penyiksaan tertutup selama bertahun-tahun. Pastor Domingos (Maubere) Soares, anggota Komite Pengarah yang ikut menyiapkan berdirinya CAVR, berharap bahwa suatu Komisi di Timor-Leste akan menunjukkan kepada rakyat Timor bahwa bunga dapat tumbuh di penjara; harapannya terwujudkan dalam transformasi ini.

154. Direktur Eksekutif yang pertama, Joao de Jesus Baptista, diangkat pada Mei 2002. Setelah pengunduran dirinya pada akhir masa tiga bulan percobaan, Komisi mengangkat Lucio dos Santos untuk menggantikannya.

155. Enam divisi dibentuk untuk melaksanakan dan mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh para Komisararis Nasional:

- Pencarian Kebenaran
- Penerimaan (*Acolhimento*) dan Dukungan Korban
- Rekonsiliasi Komunitas
- Koordinasi Regional
- Dukungan Program
- Keuangan dan Administrasi

156. Pada akhir 2003, Komisi membentuk Tim Arsip dan Comarca (lihat sub-bagian di bawah), untuk memelihara arsip-arsip Komisi dan untuk mempersiapkan rencana pengalihan Kantor Nasional menjadi pusat dokumentasi dan pengajaran mengenai hak asasi manusia dan rekonsiliasi.

157. Fokus utama dari tiap divisi adalah untuk mendukung tim-tim distrik. Beberapa divisi juga mengorganisasi kegiatan-kegiatan utama dari Kantor Nasional. Audiensi publik nasional diselenggarakan oleh Divisi Pencarian Kebenaran, dibantu oleh Divisi Dukungan Korban, serta bagian media dan logistik dari Divisi Dukungan Program. Program Reparasi Mendesak dan lokakarya pemulihan diselenggarakan oleh Divisi Penerimaan dan Dukungan Korban dari

Kantor Nasional. Penelitian dan manajemen data juga dilaksanakan oleh Divisi Pencarian Kebenaran dari Kantor Nasional.

158. Pada puncak operasinya, Kantor Nasional memiliki 124 pegawai.

CAVR sebagai institusi pembelajaran

159. Para Komisaris dan staf senior mengakui bahwa Komisi ini telah memulai upaya yang sangat berbeda dari apa pun yang pernah dialami hampir semua anggota staf. Karena itu, menjadi amat penting bahwa strategi pelatihan staf harus bersifat dinamis, menyerap pelajaran selagi program dijalankan. Rancangan awal proses pencarian kebenaran, dukungan korban, dan program rekonsiliasi komunitas di distrik-distrik lebih bersifat teoretis karena tidak pernah diuji di lapangan secara ekstensif sebelumnya. Pengalaman praktis yang didapat tim-tim distrik saat mereka menerapkan program menjadi pelajaran yang berharga dalam menyesuaikan program untuk memenuhi kebutuhan setempat. Peninjauan berkala setiap tiga bulan dilakukan untuk memastikan bahwa pelajaran yang diperoleh staf di lapangan dapat diteruskan kepada pihak manajemen, dan dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap metode operasi. Di sekitar pertengahan periode operasional, dilakukan peninjauan institusional yang menyeluruh. Peninjauan ini menjadi kesempatan resmi bagi semua staf untuk memberi ide dan saran yang berkaitan dengan program-program Komisi.

Pengembangan institusi dan pembangunan kapasitas

160. Pengembangan institusi dan pembangunan kapasitas merupakan bagian besar dari kerja Komisi dalam tahun pertamanya. Selama masa ini, Komisi harus memenuhi jadwal yang sangat ketat dalam hal perekrutan, pengembangan program, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi serta pemecahan masalah. Merancang dan menerapkan kebijakan dan prosedur perekrutan bagi 124 posisi nasional dan 154 posisi tim distrik adalah tantangan besar, terlebih lagi saat Komisi berdiri, semua departemen pemerintah, PBB, dan lembaga internasional lainnya, serta berbagai organisasi non-pemerintah, telah merekrut staf dan telah beroperasi.

161. Pada Juli 2002, Komisi telah merekrut dan melatih 220 pegawai, termasuk para Komisaris Regional dan anggota Tim Distrik. Sekitar 1.900 orang melamar untuk menempati 141 posisi di Kantor-kantor Regional dan Tim Distrik.

162. Karena tidak ada institusi sejenis sebelumnya untuk pekerjaan Komisi, perencanaan dan pelaksanaan pelatihan staf menjadi tantangan utama. Hal ini dilaksanakan dari Juli hingga September 2002. Berangkat dari manfaat pelajaran yang didapat dari proyek percontohan yang dilaksanakan pada Agustus 2002, Komisi memodifikasi program pelatihannya (lihat kotak tulisan tentang proyek percontohan, pada paragraf 72 dalam bab ini). Sama seperti para Komisaris Regional, staf tim distrik juga dilatih dalam dua kelompok besar. Setelah pelatihan

pertama, Staf akan kembali ke distrik mereka selama enam minggu sebelum berakhirnya bagian terakhir dari pelatihan. Hal ini memberi waktu bagi mereka untuk memahami proses perkembangan program Komisi. Tim-tim distrik juga bisa berpikir tentang apa yang telah mereka pelajari selama pelatihan, mencoba semua praktik dan prinsip-prinsip di lapangan, dan menyarankan perubahan pada rencana-rencana operasional.

163. Sebuah tim kecil yang terdiri atas seorang penasihat internasional dan tiga staf Timor-Leste melakukan koordinasi terhadap pengembangan kelembagaan. Tahun pertama adalah masa yang sulit dan penuh tantangan, membutuhkan jam kerja yang panjang, akal panjang, dan keyakinan bahwa Komisi ini dapat berkembang sebagai institusi sehingga akan memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Pendanaan pada awalnya tidak mencukupi karena para donatur bersedia memberi dukungan yang dibutuhkan hanya ketika nilai dari kegiatan Komisi ini menjadi nyata. Dalam keadaan seperti ini, beberapa donatur, khususnya pemerintah Inggris, dengan keyakinan yang mendalam mengambil risiko besar dengan memberi dana awal yang teramat penting.

164. Divisi hak asasi manusia misi UNTAET menyediakan personel untuk jangka waktu pendek untuk membantu memulai Komisi dan membantu dengan banyak cara lain. Divisi ini membantu Komisi mengambil langkah-langkah pertamanya dan berlanjut ke pendirian kantor sementara dan perekrutan personel inti, sampai organisasi ini dapat berjalan di atas kakinya sendiri.

165. Selama masa kerja Komisi ini, tim Pengembangan Institusi dan Pembangunan Kapasitas bekerja dengan Tim Manajemen Senior yang lebih luas untuk mengidentifikasi di mana dukungan internasional jangka pendek dan jangka panjang dibutuhkan, dan untuk merekrut staf yang memenuhi syarat.

Gender dan kepegawaian

166. Komisi ini menjalankan kebijakan yang mendorong praktik kerja yang memaksimalkan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi sebagai anggota staf organisasi ini dan sebagai peserta dalam program-program Komisi. CAVR mengakui secara resmi bahwa ada kendala-kendala besar yang mencegah perempuan berpartisipasi secara setara di tempat kerja atau dalam aktivitas politik di Timor-Leste, serta kewajiban semua lembaga untuk berupaya memperbaiki situasi ini. Karena itu, di dalam mandat Komisi ini terdapat syarat-syarat khusus bagi keterwakilan gender. Regulasi mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh Komisariss Nasional dan Regional adalah perempuan. Dua dari tujuh Komisariss Nasional dan sepuluh dari 29 Komisariss Regional adalah perempuan. Kebijakan perekrutan staf internal mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% dari posisi-posisi yang ada diisi oleh perempuan.

167. Untuk objektivitas program, adalah penting bahwa posisi-posisi tertentu ditempati perempuan dan laki-laki secara setara. Contohnya antara lain staf pengambil pernyataan dan dukungan korban, yang keduanya secara langsung

bekerja dengan para korban dan saksi dalam komunitas. Perekrutan pekerja program perempuan dalam jumlah yang lebih besar dari proporsi normal dalam bidang-bidang ini bertujuan untuk memastikan bahwa secara nasional perempuan mendapat akses yang sama ke semua aspek kerja Komisi. Kebijakan ini dirancang untuk mengakui pengalaman para perempuan selama konflik. Beberapa bagian dari Laporan Akhir, khususnya bab pelanggaran seksual, secara khusus berfokus pada pengalaman para perempuan.

168. Meskipun ada komitmen seperti ini, Komisi tidak berhasil mencapai target perekrutannya bagi perempuan. Hanya dua dari delapan anggota Tim Manajemen Senior adalah perempuan. Hanya satu dari enam Koordinator Regional adalah perempuan dan ketigabelas Koordinator Tim Distrik adalah laki-laki. Norma-norma kultural yang kuat khususnya di pedalaman Timor-Leste menyulitkan pihak Komisi untuk merekrut proporsi perempuan hingga ke tim-tim distrik seperti yang diinginkan. Perlunya anggota staf tinggal jauh dari rumah selama periode tiga bulan untuk melakukan kegiatan lapangan di sub-sub distrik di luar daerah asal mereka sendiri, menimbulkan masalah tersendiri bagi para perempuan yang memiliki tanggung jawab keluarga. Selain itu, terdapat keberatan secara kultural bila seorang perempuan menghabiskan terlalu banyak waktu jauh dari rumah mereka — dan ini semakin menambah persoalan.

Kantor Regional dan Tim Distrik

169. Komisi mendirikan enam Kantor Regional di ibukota Distrik Baucau, Suai, Maliana, Aileu, Dili, dan Oecussi. Kantor-kantor tersebut didirikan kembali di gedung-gedung yang diperbaiki oleh Komisi menggunakan dana dari Pemerintah Jepang, dan diserahkan ke Pemerintah Timor-Leste untuk digunakan setelah Komisi menyelesaikan pekerjaannya. Tiap Kantor Regional mendukung kerja dua Tim Distrik, kecuali Oecussi, yang karena secara geografis terisolasi, menjadi Kantor Regional yang hanya membawahi satu distrik, serta Baucau yang mendukung kerja empat Tim Distrik.

170. Setiap Tim Distrik terdiri atas dua hingga tiga Komisaris Regional, satu Koordinator, empat Pengambil Pernyataan Proses Pencarian Kebenaran (dua perempuan dan dua laki-laki), dua staf Dukungan Korban/Penjangkauan Komunitas (satu perempuan dan satu laki-laki), dan dua staf Rekonsiliasi Komunitas (umumnya satu perempuan dan satu laki-laki),* dengan dukungan seorang Petugas Logistik.

171. Kantor Regional diisi oleh seorang Koordinator Regional, seorang Petugas Keuangan, dan seorang Petugas Logistik. Fungsi utama Kantor-kantor Regional adalah bertindak sebagai penghubung antara Kantor Nasional dan Tim-tim Distrik. Karena sarana komunikasi dan perbankan terbatas atau tidak ada selama puncak kegiatan Komisi ini, Koordinator Regional diberi tanggung jawab untuk memastikan

* Sebelumnya, Tim-tim Distrik hanya memiliki satu pekerja Rekonsiliasi Komunitas, yang bekerja dengan Komisaris Regional dengan fokus pada pekerjaan ini. Pada akhir 2003, pekerja kedua Rekonsiliasi Komunitas ini bergabung dengan masing-masing tim.

adanya komunikasi berkala dengan Kantor Nasional. Kontak antara Tim Distrik dan Kantor Nasional terjadi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Karena kurangnya sarana komunikasi, hal ini biasanya dilakukan dengan cara pihak kantor yang satu bepergian ke kantor yang lain.

172. Pada puncak kerja Komisi, terdapat 278 staf, termasuk Komisariss Regional, yang 154 di antaranya bekerja di dalam tim regional atau tim distrik.

Gender dalam kerja distrik

173. Regulasi UNTAET mensyaratkan bahwa Komisi memasukkan pertimbangan tentang gender ke dalam semua aspek kerja Komisi. Regulasi secara khusus menyatakan bahwa sedikitnya satu dari anggota panel PRK pada tiap audiensi adalah perempuan. Tanpa adanya ketentuan ini, mungkin banyak komunitas tidak akan memilih perempuan untuk duduk di Panel melainkan mengikuti praktik tradisional, yaitu laki-laki sebagai pemimpin setempat yang memimpin acara seperti ini. Hasil yang menarik dari persyaratan gender regulasi tersebut adalah bahwa perempuan yang terpilih untuk berpartisipasi dalam panel sering memainkan peran utama dan biasanya diterima sepenuhnya oleh anggota komunitas dalam kapasitas tersebut.

174. Komisi mengambil inisiatif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan lapangannya. Mengikuti persyaratan kebijakan internal, ada anggota perempuan dalam semua tim pengambilan pernyataan di tingkat distrik. Perempuan juga didorong untuk memberikan pernyataan sehingga turut membantu tercapainya tujuan pencarian kebenaran Komisi. Pada akhir operasi lapangan, hanya 21,4% deponen yang memberikan pernyataan adalah perempuan. Banyak laki-laki yang datang memberikan pernyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia atas anggota keluarganya yang perempuan, tetapi banyak perempuan memberi kesaksian tentang apa yang terjadi pada ayah, saudara laki-laki, suami, atau anak laki-laki mereka selama konflik.

175. Tim-tim distrik mengalami kesulitan mengajak perempuan terlibat dalam proses pengambilan pernyataan karena berbagai macam alasan sosial, kultural, dan ekonomi. Di beberapa komunitas, perempuan tidak turut serta dalam penyuluhan komunitas yang diadakan oleh Komisi karena mereka harus tinggal di rumah. Lebih sedikit perempuan daripada laki-laki yang ikut dalam organisasi formal yang memiliki akses informasi tentang kerja Komisi. Beberapa perempuan merasa tidak yakin atau malu untuk maju dan memberikan kesaksian, atau merasa bahwa apa yang mereka alami telah disampaikan oleh anggota laki-laki dari keluarga mereka.

176. Satu tim yang terdiri atas enam perempuan dibentuk untuk melakukan proyek penelitian selama enam bulan tentang pengalaman perempuan selama konflik.* Tim ini mewawancarai lebih daripada 200 deponen, yang kebanyakan adalah

* Tim ini terdiri atas anggota-anggota LSM HAM perempuan seperti Fokupers, ET-Wave, Grupo Feto Foinsa'e Timor-Leste (GFFTL, Asosiasi Perempuan Muda Timor-Leste), dan anggota staf Komisi. Kerja tim ini menerima manfaat besar dari pengetahuan, keterampilan, dan kontak dari organisasi-organisasi tersebut.

perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia. Tim ini juga bertanggung jawab mengidentifikasi dan mendukung para korban yang memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Perempuan dalam Konflik pada April 2003. Audiensi publik ini sangat penting untuk semakin meningkatkan kesadaran di antara kaum perempuan tentang perlunya berpartisipasi dalam kerja Komisi.

177. Lokakarya pemulihan khusus bagi korban perempuan diadakan untuk memastikan bahwa keadaan khusus mereka mendapat perhatian dan untuk meningkatkan kepercayaan-diri serta membuka diskusi kelompok. Beberapa lokakarya Profil Komunitas melibatkan hanya perempuan. Kegiatan-kegiatan seperti ini difokuskan pada eksplorasi dan pencatatan pengalaman para perempuan dan dampak konflik yang dialami anggota komunitas perempuan.

178. Staf perempuan yang bekerja di tim distrik sering menggunakan cara-cara informal untuk bertemu dengan para perempuan di pelosok, mengunjungi rumah dan tempat-tempat berkumpul, untuk bercakap-cakap, mendengarkan pemikiran para perempuan, dan bersama-sama mencari cara yang akan membantu mereka berpartisipasi dalam kegiatan Komisi. Para anggota perempuan tim distrik sering adalah anggota komunitas terkemuka dan menjadi panutan bagi banyak perempuan di pedesaan.

179. Prinsip kesetaraan gender terkadang bersanding tidak nyaman dengan prinsip-prinsip lain Komisi seperti menghargai dan bekerja dengan tradisi dan pemimpin komunitas, karena model kepemimpinan tradisional dan penyelesaian perselisihan di Timor-Leste cenderung didominasi laki-laki. Para Komisaris regional perempuan, anggota komunitas perempuan yang duduk di panel pada Audiensi Rekonsiliasi Komunitas, dan perempuan anggota staf yang tinggal jauh dari rumah serta bekerja di komunitas pedalaman memberikan tantangan terhadap nilai-nilai tersebut.

180. Pihak Komisi berhati-hati untuk tidak menerapkan strategi-strategi tersebut di komunitas dengan cara yang konfrontatif. Anggota laki-laki seperti juga anggota tim yang perempuan berperan penting dalam diskusi-diskusi dengan para pemimpin tradisional, dan dengan demikian meraih kesuksesan tertentu dalam keseimbangan gender.

181. Komisi ingin secara khusus memuji kerja para anggota perempuan tim distrik, yang menghadapi sejumlah tantangan tambahan tapi berperan penting untuk memastikan bahwa Komisi ini dapat dijangkau oleh perempuan di pedesaan di seluruh Timor-Leste.

Peran staf internasional dalam Komisi

182. Telah diputuskan bahwa semua staf internasional di Komisi, selain Wakil Direktur, akan menjadi penasihat alih-alih manajer bidang tertentu. Para anggota staf internasional bertugas menjalankan pembangunan kapasitas dalam divisi-divisi tempat mereka ditugaskan untuk mendampingi dan memberi masukan bagi rekan kerja Timor mereka sejauh yang dimungkinkan, dan bukannya mengambil alih

tanggung jawab atas pekerjaan itu sendiri. Selain menguasai keahlian teknis dan profesional yang dibutuhkan, staf internasional diharapkan memiliki pemahaman tentang Timor-Leste dan keterampilan bekerja lintas-kultural, termasuk keterampilan berbahasa Tetum atau Indonesia. Para konsultan jangka pendek dipekerjakan jika keahlian khusus dibutuhkan.

Manajemen dan administrasi

Struktur manajemen

183. Manajemen harian badan eksekutif Komisi dipimpin oleh Direktur Eksekutif, Lucio dos Santos, dengan dukungan Wakil Direktur dan Manajer Program, Galuh Wandita. Bersama dengan enam koordinator divisi eksekutif kantor nasional, mereka membentuk Tim Manajemen Senior. Anggota tim tersebut adalah Hugo Maria Fernandes (Pencarian Kebenaran), Jaimito Candido da Costa (Rekonsiliasi Komunitas), Rosario de Araújo (Penerimaan dan Dukungan Korban), José Caetano Guterres (Dukungan Program), Ligia da Costa (Keuangan), dan Francisco João Amaral (Administrasi). Pada April 2003, ketika terjadi restrukturisasi menjadi manajemen yang sepenuhnya dikelola oleh orang Timor, Galuh Wandita berhenti dari posisinya sebagai Wakil Direktur tetapi terus berperan sebagai Manajer Program.

184. Kantor Regional yang kecil berfungsi sebagai jembatan antara Kantor Nasional dan Tim-tim Distrik. Kantor-kantor ini dipimpin oleh Koordinator Regional. Setiap tim distrik dipimpin oleh dua atau tiga Komisariss Regional, yang bertanggung jawab dalam hal manajemen harian atas staf dan program, bersama-sama dengan Koordinator Tim Distrik.

185. Pada Desember 2002, sebuah lokakarya tiga hari, yang diikuti oleh para Komisariss Regional, Koordinator Regional, Koordinator Tim Distrik, manajemen senior, serta Komisariss Nasional, menghasilkan revisi rencana strategis dan klarifikasi tugas-tugas divisi. Pada Mei 2003, Komisi memfasilitasi peninjauan institusi untuk melihat kinerja setiap Tim Distrik, Kantor Regional, dan divisi-divisi Komisi. Peninjauan ini menghasilkan 92 rekomendasi spesifik tentang cara-cara meningkatkan kinerja, koordinasi, penjangkauan, pembagian informasi, dan kesetaraan gender dalam semua aspek kerja Komisi.

Administrasi

186. Divisi Administrasi bertanggung jawab memberi dukungan administratif bagi kerja Komisi. Hal ini termasuk logistik dan pengadaan kebutuhan, sumberdaya manusia, dan dukungan informasi dan teknologi.

187. Koordinator Divisi Administrasi bekerjasama dengan Direktur Eksekutif untuk memastikan semua aspek kerja Komisi memperoleh dukungan. Memenuhi kebutuhan

logistik yang besar dan operasi Komisi yang beragam, dengan dukungan infrastruktur yang minim, adalah tantangan sehari-hari.

Keuangan

188. Divisi Keuangan bertanggung jawab atas pengaturan semua masalah keuangan Komisi. Ini meliputi laporan keuangan bulanan, pengawasan manajemen Kantor Regional, penyediaan semua informasi untuk audit yang dilaksanakan oleh Kantor Inspektur Jenderal pemerintah nasional, dan laporan kepada donatur.

189. Komisi bertanggung jawab menghimpun dananya sendiri. Para Komisaris Nasional, staf senior, dan staf penasihat internasional bekerja keras untuk mendapatkan sumberdaya bagi kerja Komisi, dan untuk menjaga pertukaran informasi dan menyediakan laporan kepada para donatur. Menjaga hubungan yang erat dengan para donatur adalah hal inti bagi kesuksesan kerja Komisi. Pendekatan kepada para donatur untuk memberikan dana tambahan pun diperlukan, khususnya karena program-program berkembang menanggapi kehendak komunitas dan Komisi menuntut perpanjangan waktu operasional untuk menyelesaikan Laporan ini. Fakta bahwa para donatur selalu diberi informasi terbaru, bahwa laporan keuangan bersifat menyeluruh dan terkini, dan bahwa informasi yang transparan atas semua aspek operasi Komisi tersedia, menjadi amat penting untuk mendapatkan dana tambahan yang diperlukan.

190. Tiga audit keuangan independen terhadap Komisi ini telah dilakukan oleh Kantor Inspektur Jenderal. Dalam audit-audit tersebut, Inspektur Jenderal memberikan laporan yang positif atas manajemen keuangan Komisi. Beberapa rekomendasi khusus diberikan untuk memperbaiki beberapa bidang administrasi tertentu. Komisi menjalankan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Audit pertama mencakup periode 1 Mei 2002 hingga 31 Desember 2002. Audit kedua mencakup periode 1 Januari 2003 hingga 31 Desember 2003, dan audit ketiga mencakup periode 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2004. Selain Audit yang dilakukan oleh Kantor Inspektur Jenderal RDTL (República Democrática de Timor-Leste), khusus untuk dana bantuan dari Pemerintah Jepang, Komisi juga diaudit oleh auditor internasional, Merit Partners dari Australia, pada 2005, dengan hasil yang memuaskan. Pada saat penulisan Laporan ini, sebuah rencana untuk audit terakhir akan dilaksanakan sesudah ditutupnya Komisi pada 31 Oktober 2005.

Pengurangan staf dan restrukturisasi

191. Dalam penyelesaian kerja lapangan Komisi, pihak eksekutif melakukan proses pengurangan staf dan restrukturisasi. Rencana strategis didasarkan pada periode operasional tiga bulanan di tiap subdistrik. Karena jumlah subdistrik di setiap distrik berbeda-beda, beberapa tim distrik menyelesaikan pekerjaannya sebelum tim distrik yang lain. Hal ini memungkinkan mereka beralih membantu program di daerah di mana masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tim-tim distrik dan kantor-kantor regional menutup kantor mereka ketika semua aktivitas lapangan

selesai pada akhir Maret 2004. Pada saat itu Komisi mengurangi dua per tiga stafnya, dan semua staf yang tersisa dipusatkan di Kantor Nasional.

192. Anggota staf tim distrik yang menyelesaikan tugas mereka pada Maret 2004 dialihkan ke Comarca untuk membantu memasukkan ke dalam *database* sejumlah besar informasi yang telah dikumpulkan. Pengurangan staf berikutnya dilakukan ketika proses pemasukan data selesai pada Juli 2004.

193. Ciri kerja Komisi berubah drastis dengan berakhirnya operasi lapangan. Struktur manajemen yang baru diperlukan karena kini aktivitas berfokus pada penulisan dan produksi Laporan Akhir, serta persiapan pengarsipan. Setelah dua bulan masa transisi, Kantor Nasional direorganisasi. Struktur yang baru terdiri atas enam divisi: Laporan Akhir (Editorial, Penulisan, dan Produksi, termasuk penerjemahan); Reparasi; Rekomendasi dan Kampanye; Comarca dan Arsip; Administrasi; dan Keuangan. Sejalan dengan berkembangnya proses penulisan, penyuntingan, penerjemahan, dan produksi Laporan Akhir, tim lain tidak lagi dibutuhkan atau hanya memerlukan jauh lebih sedikit staf. Proses pengurangan personel bertahap berlanjut hingga akhir periode mandat Komisi.

Membangun hubungan untuk masa depan

Hubungan langsung

194. Fokus utama kerja Komisi ini adalah pada tingkat akar-rumput, dengan komunitas-komunitas di penjuru Timor-Leste, khususnya dengan para korban pelanggaran hak asasi manusia dan keluarga mereka. Adalah hal yang penting bahwa pemuka masyarakat, dan berbagai institusi serta organisasi memahami Komisi dan pekerjaannya. Komisi ini berkoordinasi dengan kepala desa dan pemimpin tradisional lainnya, organisasi perempuan dan pemuda, para pastor, suster, dan pemuka Gereja Katolik serta organisasi keagamaan lainnya, polisi, pegawai negeri lokal, dan perwakilan masyarakat sipil lainnya. Di beberapa komunitas, telah dibentuk kelompok-kelompok dukungan korban, contohnya kelompok Rate Laek di Liquiçá. Mereka adalah mitra penting bagi Komisi.

195. Lembaga pemerintah nasional termasuk Kepresidenan, Parlemen, dan Kabinet selalu diberi informasi terkini tentang kerja Komisi. Para wakil Komisi menghadap sidang pleno Parlemen Nasional dan komite-komite terkait ketika tiga permohonan perpanjangan mandat Komisi ini dibahas. Pada kesempatan tersebut, para anggota Parlemen meminta untuk diberitahu mengenai perkembangan terkini dari kerja Komisi. Dalam kedua kesempatan tersebut, pandangan umum Parlemen adalah bahwa tugas Komisi ini demikian penting bagi Timor-Leste sehingga harus diberi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.

196. Presiden Xanana Gusmão telah mendukung kerja Komisi dalam berbagai cara praktis, termasuk meminta dana bagi Komisi dari para donatur, hadir pada peresmian kantor pusat Komisi Comarca, mendukung audiensi publik nasional

yang sensitif tentang konflik politik internal tahun 1974 - 1976. Perdana Menteri Mari Alkatiri dan Kabinetnya, khususnya Menteri Senior dan Urusan Luar Negeri dan Kerjasama, José Ramos-Horta, juga telah sangat mendukung Komisi ini. Komisi ini memperoleh dukungan lintas-partai di Parlemen. Menteri urusan Administrasi Negara, Ana Pessoa Pinto adalah anggota Dewan Penasihat Komisi, seperti halnya Jose Ramos-Horta.

197. Gereja Katolik memegang peranan yang terhormat dan berpengaruh dalam keseharian sebagian besar orang Timor, yang lebih daripada 90%-nya menganut ajaran Katolik. Gereja telah memberi dukungan moral yang besar bagi kerja Komisi. Para pastor secara individual mendorong umat mereka untuk membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan Komisi. Para pemuka Katolik sering dipilih untuk menjadi anggota Panel audiensi PRK. Gereja Protestan juga telah mendukung program-program Komisi. Salah satu dari Komisararis Nasional, Pendeta Agostinho de Vasconcelos adalah pendeta Protestan, sedangkan Wakil Ketua, Padre Jovito do Rêgo de Araújo adalah pastor Katolik.

198. Komisi ini juga berkoordinasi dengan berbagai LSM nasional yang bekerja di bidang keadilan dan hak asasi manusia. Banyak Komisararis Nasional dan Regional memiliki latar belakang sebagai aktivis hak asasi manusia dan anggota organisasi hak asasi manusia. Keberadaan Komisi ini jelas-jelas telah berdampak pada organisasi hak asasi manusia lainnya. Terdapat semacam kebimbangan di antara organisasi-organisasi ini mengenai kemunculan tiba-tiba sebuah ajang hak asasi manusia yang relatif besar ini, yang mendapat dukungan resmi dan mampu menarik dana yang cukup besar. Hal ini dapat dimengerti khususnya bagi LSM-LSM yang telah beroperasi pada masa pendudukan Indonesia yang jauh lebih sulit, ketika para anggota mereka menghadapi risiko pribadi yang besar akibat komitmen tersebut, dan yang akan terus bekerja di bidang rekonsiliasi dan hak asasi manusia setelah Komisi ini dibubarkan.

199. Secara khusus, dua LSM hak asasi manusia, yakni Asosiasaun Hak (Yayasan HAK) dan Fokupers telah bekerja dengan Komisi dalam berbagai cara, termasuk dalam penelitian, dukungan bagi korban pelanggaran, dan dalam dokumentasi kerja Komisi pada audiensi tematis. Justice System Monitoring Program (JSMP) dan LSM La'o Hamutuk mengulas secara kritis beberapa aspek kerja Komisi.

200. Pihak Komisi mencari ide dari berbagai sektor untuk menyusun rekomendasi dalam Laporan ini. Komisi mengadakan enam lokakarya pemangku kepentingan [*stakeholder*] pada tingkat nasional, untuk meminta pendapat dari individu dan organisasi terkemuka yang aktif dalam bidang-bidang yang relevan dengan mandat Komisi. Topik-topik tersebut mencakup rekonsiliasi, kesehatan, pendidikan, keamanan, anak-anak, dan keadilan. Komisi juga bekerja erat dengan Komite Penyelenggara Kongres Nasional Perempuan Kedua pada Juli 2004. CAVR berharap untuk mempertimbangkan ide-ide dan keprihatinan para wakil perempuan dari seluruh penjuru negeri dalam perumusan Rekomendasinya.

Nota Kesepahaman dengan Kantor Kejaksaan Agung

Pada 4 Juni 2002 ketua Komisi, Aniceto Guterres Lopes, dan Jaksa Agung Timor-Leste, Longuinhos Monteiro, menandatangani Nota Kesepahaman tentang hubungan kerja antara Komisi dan Kejaksaan Agung Timor-Leste, yang tanggungjawabnya mencakup penuntutan atas kejahatan berat. Pentingnya ada nota seperti ini sangat terlihat pada tahap operasional dari kerja pencarian kebenaran dan rekonsiliasi komunitas Komisi.

Nota ini memerinci kondisi di mana informasi dapat dipertukarkan antara Komisi dan Kejaksaan Agung. Ia mencantumkan bahwa Komisi dan Kantor Jaksa akan melindungi independensi dan integritas kedua institusi ini. Ia juga akan melindungi kerahasiaan informasi yang diterima oleh kedua institusi. Sementara Komisi dan Kejaksaan Agung adalah dua institusi independen yang memiliki mandat yang berbeda, nota ini mengakui bahwa “kedua organisasi diwajibkan bekerja bersama sejauh yang dimungkinkan di dalam lingkup mandat masing-masing untuk membantu proses keadilan bagi pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste di masa lalu.”

Kampanye media dan informasi

201. Strategi media massa Komisi ini berpusat pada produksi program radio mingguan, *Dalan ba Dame* (Jalan Menuju Damai). Radio adalah media yang paling luas jangkauannya dan paling efektif di Timor-Leste. Jaringan radio menyediakan cakupan nasional yang hampir menyeluruh, dan beberapa stasiun berbasis komunitas di distrik-distrik menggunakan bahasa setempat dalam siarannya. Siaran radio juga dipancarkan ke banyak orang asal Timor-Leste yang tinggal di tempat-tempat pengungsian dan komunitas di Timor Barat. Siaran televisi terbatas hanya di Dili, dan (lebih terbatas lagi) di kota besar kedua, Baucau. Mayoritas penduduk perdesaan tidak dapat membaca dan menulis, sehingga membatasi efektivitas materi tertulis.

202. Dengan memproduksi program radionya sendiri, Komisi ini memastikan bahwa komunitas-komunitas di seluruh wilayah dapat merasakan dimensi nasional atas apa yang terjadi di daerah mereka. Pemirsa nasional dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan di akar-rumput. Program radio mingguan berdurasi satu jam ini disiarkan oleh stasiun radio nasional Radio Timor-Leste dan stasiun

radio nasional Gereja Katolik Radio Timor Kmanek. Program pertama disiarkan pada 4 Desember 2002 dan disiarkan terus-menerus setiap minggu selama masa kerja Komisi. Pada Oktober 2004 durasi program tersebut dikurangi menjadi 30 menit. Stasiun radio komunitas di beberapa distrik juga menyiarkan program ini. Komisi ini juga bekerja dengan stasiun-stasiun radio yang lebih kecil seperti Radio Falintil dan Radio Rakambia untuk menyiarkan audiensi rekonsiliasi komunitas secara langsung ke beberapa distrik. *Dalan ba Dame* diproduksi dalam bahasa Tetum, meskipun peliputan audiensi lokal atau peristiwa-peristiwa lainnya sering menggunakan bahasa-bahasa regional. Kemudian, stasiun-stasiun radio komunitas sering membahas kerja Komisi dalam bahasa-bahasa setempat mereka.

203. Komisi ini membangun kerjasama dengan siaran televisi nasional Televisi Timor-Leste (TVTL). Televisi Timor-Leste dan Radio Timor-Leste menghadirkan liputan lengkap tujuh audiensi nasional. Komisi juga membuat dua video tentang kerja Komisi untuk disebarluaskan ke komunitas-komunitas. Tim-tim distrik membawa televisi dan generator ke komunitas pedalaman untuk memperlihatkan video-video tersebut, yang terbukti sangat efektif untuk mengumpulkan orang-orang dan berbagi informasi. Video-video tersebut juga diperlihatkan kepada mereka yang berada di Timor Barat sebagai bagian dari program penjangkauan. Video-video ini diproduksi dalam bahasa Tetum sebagai bahasa narasi, dengan alih-suara berbahasa Indonesia dan Inggris.

204. Sejumlah terbitan cetak diproduksi untuk menjelaskan mandat dan kerja Komisi kepada komunitas-komunitas. Terbitan-terbitan ini diproduksi dalam bahasa Tetum, Indonesia, dan Inggris. Sebuah buletin yang melaporkan perkembangan kerja Komisi dalam bahasa Portugis, Indonesia, dan Inggris, diterbitkan setiap dua bulan. Sasaran utama mereka adalah para pemangku kepentingan institusi dan organisasi.

205. Unit ini juga menangani siaran media dan pers. Artikel-artikel dan materi-materi tertulis dipublikasikan di *Cidadaun* dan *Talitakum*, jurnal Timor-Leste ternama dengan jangkauan pembaca di Timor-Leste dan Timor Barat. Benda-benda populer yang digunakan untuk memperkenalkan Komisi ini antara lain poster, buket, brosur, dan kaus.

Komunitas internasional

206. Komisi ini menyadari bahwa kerja Komisi ini penting baik secara nasional maupun internasional. Karena itu, Komisi mendorong terbentuknya hubungan dengan komunitas hak asasi manusia internasional. Ini barangkali menjadi perhatian utama di kawasan Timor-Leste itu sendiri, terhubung tidak satu pun negara di kawasan ini pernah mendirikan komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

207. Sejalan dengan perkembangan kegiatannya, Komisi ini menerima begitu banyak permintaan informasi tentang kerjanya, khususnya program PRK yang inovatif. Para Komisaris Nasional dan staf senior menghadiri berbagai konferensi internasional, seminar, dan lokakarya tentang hak asasi manusia, rekonsiliasi

pascakonflik, dan keadilan transisi, untuk berbagi pengalaman serta belajar dari pengalaman peserta lain. Selain itu Komisi juga menerima puluhan delegasi internasional yang berkunjung untuk belajar dari pengalaman Komisi. Tamu-tamu ini mencakup pejabat senior dan perwakilan-perwakilan dari negara-negara yang mengalami konflik atau berupaya untuk mengatasi masalah-masalah mereka dari masa lalu, seperti Myanmar, Afghanistan, Bougainville, Fiji, Filipina/Mindanao, Indonesia/Aceh dan Papua Barat, dan Sri Lanka.

208. PBB memberikan dukungan yang signifikan bagi Komisi ini. Unit Hak Asasi Manusia UNTAET dan UNMISSET, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan UNDP, baik yang berada di Timor-Leste maupun di New York, memberikan dukungan dan saran teknis. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Mary Robinson, bertemu dengan para Komisaris Nasional di Dili pada April 2002 dan menghadiri audiensi rekonsiliasi komunitas di Distrik Liquiçá. Mary Robinson menjadi anggota Dewan Penasihat Komisi.

209. Komisaris Tinggi PBB bagi Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Migrasi Internasional (International Organization for Migration, IOM) bekerja membantu para pengungsi yang kembali dari Timor Barat serta menolong kebutuhan logistik Komisi, seperti menyediakan penerbangan ke distrik kantong Oecussi. Komisi ini juga bekerja erat dengan beberapa LSM internasional yang memiliki kantor di Timor-Leste. Sejumlah LSM memberikan submisi, atau menyediakan hasil penelitian independen mengenai aspek kerja Komisi. LSM-LSM tersebut antara lain Catholic Relief Services dan The Asia Foundation.

210. Pusat Keadilan Transisi Internasional (ICTJ) di New York memberikan saran dan dukungan bagi Komisi ini sejak Komisi ini berdiri hingga menyelesaikan tugasnya; ICTJ adalah mitra yang sangat berharga (lihat boks Tonggak-tonggak Sejarah Komisi, di akhir bagian ini). Kelompok Analisis Data Hak Asasi Manusia (The Human Rights Data Analysis Group - HRDAG) memberikan dukungan teknis. Mereka membentuk dan memelihara *database* hak asasi manusia. Mereka juga melakukan penelitian angka kematian dan menganalisis data yang dikumpulkan. Bagian 6: Profil pelanggaran HAM, dan Lampiran Metodologi Statistik, mencantumkan penjelasan lengkap tentang kerja HRDAG.

211. Komisi ini merancang situs web yang memberi jangkauan kepada komunitas internasional. Dokumen-dokumen yang dipublikasi, buletin berkala tentang kerja Komisi, dan foto-foto peristiwa juga ditempatkan di situs web ini. Situs web ini sering dikunjungi oleh anggota-anggota media internasional, organisasi hak asasi manusia, pelajar, akademisi, dan lembaga donatur. Laporan ini juga diterbitkan di situs web tersebut (<http://www.cavr-timorleste.org>).

Penjangkauan komunitas dan informasi publik

212. Unit Informasi Publik dan Penjangkauan Komunitas bertujuan meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan dan kalangan umum mengenai Komisi dan kerjanya, dengan membangun hubungan langsung, pendidikan publik,

dan kampanye media. Hal ini meliputi pembangunan mekanisme penyediaan informasi bagi semua tingkatan masyarakat, dari pengambil keputusan nasional dan lembaga serta organisasi non-pemerintah, administrasi distrik, dan para pemimpin dan kelompok komunitas lokal, serta khalayak umum yang lebih luas. Ini juga menjangkau kalangan internasional, termasuk lembaga-lembaga di dalam dan di luar Timor-Leste, negara dan organisasi donatur, dan komunitas hak asasi manusia dan peradilan internasional.

Tabel 1: Tonggak-tonggak sejarah Komisi	
Juni 2000	Lokakarya tentang keadilan transisi bagi para pelaku kampanye hak asasi manusia.
Agustus 2000	Kongres CNRT menyerukan didirikannya sebuah komisi untuk kebenaran dan rekonsiliasi bagi Timor-Leste. Sebuah Komite Pengarah untuk pendirian Komisi tersebut dibentuk.
Desember 2000	Konsultasi skala nasional diadakan. Para anggota Komite Pengarah merancang regulasi.
Desember 2000	Pengesahan kebijakan oleh Kabinet Administrasi Transisi.
April 2001	Kabinet Administrasi Transisi mengesahkan rancangan regulasi.
13 Juni 2001	Dewan Nasional mengesahkan rancangan regulasi
13 Juli 2001	Penetapan Regulasi UNTAET 2001/10 oleh Administrator Transisi; pendirian Kantor Sementara

23 - 25 Agustus 2001

Konsultasi dengan para pemimpin pro-otonomi oleh Komite Pengarah, dengan dukungan Kantor Sementara, di Kupang dan Bali.

15 - 16 September 2001

Pertemuan konsultasi kedua dengan para pemimpin pro-otonomi di Bali.

20 September 2001

Panel Seleksi didirikan untuk memilih para Komisaris Nasional dan mengumpulkan nominasi-nominasi untuk Komisaris Regional.

Oktober 2001

Kunjungan oleh Panel Seleksi ke 13 distrik dan ke Timor Barat untuk menominasikan para Komisaris Nasional dan Regional.

21 Januari 2002

Para Komisaris Nasional diambil sumpah jabatannya.

22 - 26 Januari 2002

Para Komisaris Nasional melakukan Retret di Maubara; prinsip-prinsip inti dari Komisi dikembangkan, dengan bantuan ICTJ.

4 Februari 2002

Pertemuan para Komisaris Nasional pertama. Pemilihan Ketua dan Deputi Ketua Komisi, serta penentuan portofolio.

7 Februari 2002

Penunjukan para Komisaris Nasional diterbitkan dalam edaran resmi pemerintah, dan secara resmi memulai proses pendirian Komisi selama dua bulan.

April-Mei 2002

Perekrutan para staf senior eksekutif; Komisi diakui dalam Konstitusi baru Timor-Leste.

15 Mei 2002

Duapuluh-semilan Komisaris Regional diambil sumpah jabatannya oleh Administrator Transisi.

Juni - Juli 2002

Dokumen-dokumen kebijakan, termasuk Rencana Strategis, Petunjuk Operasi, dan Petunjuk Finansial dikembangkan; kebijakan tentang kerahasiaan, anak-anak, perempuan, dan hak-hak para deponen; perangkat-perangkat dasar seperti formulir pengambilan pernyataan untuk pencarian fakta dan rekonsiliasi komunitas mulai dikembangkan.

4 Juni 2002

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung

Juni - Agustus 2002

Perekrutan dan pelatihan para staf nasional, distrik, dan regional; program Komisi dimulai di 13 distrik, termasuk konsultasi-konsultasi subdistrik; didirikan 6 divisi di Kantor Nasional; didirikan 6 kantor Regional yang mengawasi hasil kerja dari 13 Tim Distrik.

23 Agustus 2002

Audiensi Rekonsiliasi Komunitas pertama di Desa Maumeta, Liquiçá.

September 2002

Tinjauan dan perencanaan program di Dare; Program Reparasi Mendesak dilaksanakan; pengambilan pernyataan dimulai.

11- 12 November 2002

Audiensi Publik Tingkat Nasional pertama, audiensi korban yang diberi tema “Dengarkanlah Suara Kami”

Desember 2002

Evaluasi dari periode operasional tiga bulan pertama.

Januari 2003

Revisi rencana strategis dan mekanisme koordinasi.

17-18 Februari 2003

Comarca Balide diresmikan sebagai kantor pusat nasional Komisi; Audiensi Publik Kedua tentang Penyiksaan dan Penahanan; program penjangkauan Timor Barat dimulai.

21 April 2003

Audiensi Korban Subdistrik pertama, di Ainaro Vila, Ainaro.

28 - 29 April 2003

Audiensi Publik Nasional ketiga tentang Perempuan dan Konflik.

Juni 2003

Evaluasi institusi terhadap Komisi dan kemajuannya; Sensus Makam dimulai.

23 - 27 Juni 2003

Lokakarya Pemulihan pertama.

28 - 29 Juli 2003

Audiensi Publik Nasional keempat tentang Kelaparan dan Pemindahan Paksa.

9 - 14 Agustus 2003

Lokakarya Pemulihan kedua.

September 2003

Survei Tingkat Kematian Retrospektif dimulai.

19 - 21 November 2003

Audiensi Publik Nasional kelima tentang Pembantaian.

2 - 6 Desember 2003

Lokakarya Pemulihan ketiga.

15 - 18 Desember 2003

Audiensi Publik Nasional keenam tentang Konflik Partai Internal.

Desember 2003

Lokakarya evaluasi dan menentukan prioritas untuk kerja lapangan yang tersisa.

27 - 30 Januari 2004

Lokakarya Pemulihan Keempat (bagi perempuan).

9 - 13 Februari 2004

Lokakarya Pemulihan kelima.

9 - 11 Maret 2004

Lokakarya Pemulihan keenam.

15 - 18 Maret 2004

Audiensi Publik Nasional ketujuh tentang Aktor Internasional dan Hak Penentuan Nasib Sendiri.

Maret 2004

Penutupan kegiatan di distrik; pertemuan penutupan kegiatan distrik dan lomba gambar anak-anak di 13 distrik; lokakarya evaluasi nasional; restrukturisasi dan penyusutan badan eksekutif.

29 - 30 Maret 2004

Audiensi Publik Nasional kedelapan tentang Anak-anak dan Konflik; pameran lomba gambar anak-anak di Kantor Nasional.

April 2004

Didirikannya Tim Penulisan dan Editorial.

Oktober 2004

Parlemen menyetujui memperpanjang mandat komisi menjadi 39 bulan kegiatan, untuk menyampaikan Laporan Akhirnya dan ditutup pada 7 Juli 2005.

Juli 2005

Parlemen Nasional memperpanjang mandat Komisi ke 29 Juli dan meminta Presiden untuk menyerahkan Laporan Akhir ke Parlemen Nasional dalam Bahasa Portugis dua bulan kemudian.

29 Juli

Parlemen Nasional memperpanjang mandat Komisi hingga 31 Oktober

31 Oktober

Penyerahan Laporan Akhir ke Presiden RDTL dan Penutupan Komisi

Catatan akhir

1. Regulasi 10/2001 Pasal 13.1(a)(iv).
2. Hasil Kongres Nasional CNRT, 21 – 30 Agustus 2000, hal. 16.
3. Regulasi nomor 10/2001, Bagian 11.1.
4. Regulasi UNTAET nomor 10/2001, sub-bagian 39 dan 44.

